

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM
PADA MADRASAH TSANAWIYAH DI KELURAHAN
PUSPANEGARA-BOGOR**



**Oleh:
Muhammad Seftian Akbar
NIM : 14913040**

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan**

**YOGYAKARTA
2017**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM
PADA MADRASAH TSANAWIYAH DI KELURAHAN
PUSPANEGARA-BOGOR**



Oleh:

Muhammad Seftian Akbar

NIM : 14913040

Pembimbing

Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Seftian Akbar

NIM : 14913040

Konsentrasi : Pendidikan Islam

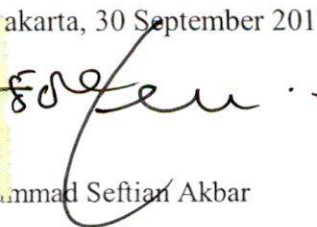
Judul Tesis : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Pada
Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara-
Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi , maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 30 September 2017





Muhammad Seftian Akbar



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1120/PS-MSI/Peng/JX/2017

**TESIS berjudul : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA
MADRASAH TSANAWIYAH DI KELURAHAN
PUSPANEGERA BOGOR**

Ditulis oleh : Muhammad Seflihan Akbar

N. I. M. : 14913040

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2017

Ketua





PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (SI)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Dewantara Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Seftian Akbar
 Tempat/tgl lahir : Bogor, 23 September 1990
 N. I. M. : 14913040
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Judul Tesis : **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM
 PADA MADRASAH TSANAWIYAH DI KELURAHAN
 PUSPANEGARA BOGOR**

Ketua : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Sekretaris : Dr. Junanah, MS

Pembimbing : Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd

Penguji : Prof. Dr. Maragustam Siregar, MA

Penguji : Dr. Lantip Dlat Prusojo, M.Pd

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2017

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : Lulus

UNIVERSITAS

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana
 Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
 No. : 1689/PS-MSI/ND/X/2017

**TESIS berjudul : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM
 PADA MADRASAH TSANAWIYAH DI KELURAHAN
 PUSPANEGERA BOGOR**

Ditulis oleh : Muhammad Seftian Akbar

NIM : 15913040

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Pengujian Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2017
 Ketua,



YOGYAKARTA, 16 Oktober 2017
 Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM
 INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Pada Madrasah
Tsana'iyah di Kelurahan Pusponegara - Bogor

Nama : Muhammad Seftian Akbar

NIM : 14913040

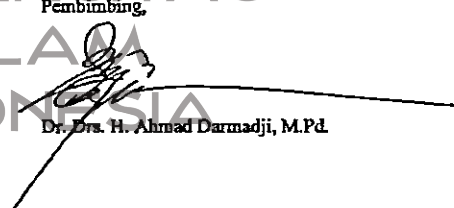
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 September 2017

Pembimbing,


Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Cucu Ruhyati Juliani, yang tidak putus-putusnya memberikan support dan mendoakan saya demi kelancaran studi dan karir saya di Yogyakarta
2. Adikku Intan Pertiwi Nurjanah, Aulia Puspita Hapsari dan Iparku Rio Sumoket yang selalu bertanya kapan mas lulus S2 ? supaya aku bisa maen ke Jogja.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan Islam di Indonesia
4. Seluruh Civitas akademika Universitas Islam Indonesia Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam sebagai salah satu tempat saya menimba ilmu dan berorganisasi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِ الْبَشَرَةِ وَأَسْتَلِزِ الْإِنْسَانِيَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنِ اهْتَدَى لِسُنَّتِهِ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ﴾

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kita bersaksi, dan kepada-Nya pula kita memohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kita. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepa Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

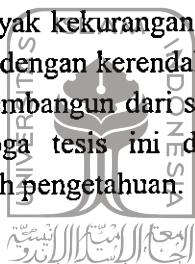
Dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu secara khusus, penulis haturkan terimakasih pada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan tesis ini, di antaranya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nandang Sutrisno, SH, LLM, M.Hum, Ph.D beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
3. Dr. Hujair AH, Sanaky, MSI selaku ketua Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. YUSDANI, M.Ag
5. Dosen pembimbing tesis Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. yang telah membimbing, memberikan saran, ilmu, pengalaman, doa, dan support yang sangat berarti dan luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
6. Para staf pengajaran PPs MSI-UII yang selalu saya repotkan, terima kasih atas segala info yang diberikan.
7. Ibunda Cucu Ruhyati Juliani Ayahanda H. Sutrisno yang selalu kuhormati, yang tak pernah kenal lelah dan pantang mengeluh dalam hidupnya, yang telah membesarkanku dengan ketulusan cinta dan air matanya, memberiku motivasi terbesar untuk menjalani hidup, yang mengajarku ilmu kehidupan, serta mendidikku dengan ketulusan dan ketegaran.
8. Adikku tercinta Intan Pertiwi Nurjanah dan si bontot Aulia Puspita Hapsari, kalian sumber inspirasi, sumber kebahagiaan disaat berjibaku dengan penyusunan tesis, canda kalian yang mengembalikan semangatku disaat aku lelah dan letih.
9. Calon pendampingku Cynthia Oktaria beserta keluarga
10. Keluarga Besar Artawinata di Bogor yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama menuntut ilmu di Jogja
11. Keluarga Besar Mbah Parmono di Jawa Timur yang tak pernah putus mendoakan cucunya di Jogja
12. Keluarga Besar Oma Haryatini Sopiah di Karang Asem Barat
13. Komisariat HMI MPO Fakultas Ilmu Agama Islam
14. Teman - teman FIAI, PPs MSI-UII dari semua angkatan, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua
15. Sahabatku di kala susah dan senang Maulana Farhanuddin, Andrian Ades Prawidi, Azhar Hafidz, Ramadhian Sendy, Azhar Hafidz, Zakia Asfa, Anang Ilham, Ahsan Qhosos, Sugeng Suluh, Wahid Kusnawan, Angga Septiawan, Sumarno, Bayu Mogana, Khairul Fadli, Subekti, Muhammad Marizal, Nur Muhairoh Darajatun, Ami, Angga Wisuda, Rizki Habibi, Mulyadi, Dimas Firdaus, Dimas Panji, Iis, Zaki, Manaf, dkk

16. Teman-teman sawojajar Deden, Taufik, Aka, Ilhamsyah, Hafidz, Bang Alan, Syukri, Bagus Rizki, dkk
17. Komunitas Madridista Jogja (MIJO)
18. Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ)
19. Teman-teman Tamkul (Taman Kuliner) Anggajaya III Condong Catur
20. Dan semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih, yang berupa semangat, saran, kritik dan Doanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi hasil yang lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan.



Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 23 September 2017

Muhammad Seftian Akbar

ABSTRAK

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara- Bogor

Muhammad Seftian Akbar

14913040

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan elemen yang terlibat didalamnya. Prakteknya saat ini tidak dapat dibebankan kepada negara sepenuhnya, dewasa ini lembaga pendidikan Islam khususnya memerlukan kemandirian finansial dan SDM yang kompeten dalam mengatur pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut. Dengan pengaturan pembiayaan yang kooperatif, efektif dan efisien lembaga pendidikan Islam mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Merujuk dari problematika di atas, penelitian ini memiliki pertanyaan yang memfokuskan pada bagaimanakah manajemen pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini, adapun lokasi penelitiannya bertempat di Madrasah Tsanawiyah Kelurahan Puspanegara-Bogor

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari milles dan hubberman.

Hasil penelitian menyatakan sumber dana yang melimpah dan SDM yang baik merupakan tolak ukur suksesi penerapan pembiayaan pendidikan Islam, kendati demikian kemandirian finansial sebagai penunjang sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan Islam, agar tidak selalu terpaku pada sumber dana utama. Pembukuan tidak cukup mempunyai SDM yang jujur tapi juga

akuntabel yang erat kaitannya dengan transparansi. Tahapan auditing memerlukan auditor yang tidak hanya serius dalam memeriksa tapi juga berkala.

Kata kunci : Manajemen, Pembiayaan Pendidikan Islam



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT**Management of Islamic Education Finance in Madrasah
Tsanawiyah Puspanegara Subdistrict- Bogor**

Muhammad Seftian Akbar
14913040

Education Finance is a responsibility of State, society and any elements involved in it. In practice, today it cannot be burdened completely to the State. Any Islamic institution nowadays particularly needs a financial independence and competent Human Resources in managing the education finance. With a cooperative, effective and efficient management, the Islamic educational institution is able to compete with other institutions. Based upon the issue above, this research has a question more focused on how the management of Islamic education finance today in Indonesia and the location of the research was located in Madrasah Tsanawiyah Puspanegara Subdistrict -Bogor

This is a descriptive research using a qualitative approach. The method in collecting data was through the method of observation, interview and documentation. The technique of data analysis on the interactive model of Milles and Hubberman was used in this research.

The result of the research revealed that the abundant fund sources and Human Resources were the parameters of the success in the implementation of the Islamic education finance. However, the independent finance also becomes a support that is highly needed by each Islamic education institution so as to be not dependent upon the main fund source. It is not only requiring an adequate bookkeeping but also requiring the honest and accountable Human Resources that are tightly related to the transparency. The auditing phase needs an auditor that is not merely serious in examining but also it must be done periodically.

Keywords: Management, Islamic Education Finance

November 2, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka.....	8
B. Konsep pembiayaan pendidikan	
1. Konsep pembiayaan pendidikan.....	30
2. Konsep pengelolaan keuangan.....	33
3. Karakteristik pembiayaan	34
4. Kegiatan pembiayaan.....	35

BAB III METODE PENELITIAN..... 49

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	50
1. Lokasi Penelitian.....	50
2. Subjek penelitian.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	51
1. Observasi.....	51
2. Wawancara.....	51
3. Dokumentasi.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	52
1. Tahap Pengumpulan Data.....	53
2. Reduksi Data.....	53
3. Display Data.....	53
4. Verifikasi Data.....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 55

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum.....	55
2. Keadaan Administrasi dan Pemerintahan.....	56
3. Keadaan Demografi, Sosial, Ekonomi.....	57
B. Profil Sekolah	60
1. Denah Lokasi	64

2. Jumlah Rombel.....	65
3. Struktur Organisasi.....	65
4. Daftar Pendidik dan Non Kependidikan.....	65
C. Deskripsi Informan Penelitian.....	66
1. Informan Kunci.....	66
2. Informan Pendukung.....	68
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	69
1. Budgetting.....	69
2. Accounting.....	76
3. Auditing.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	89



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Rombel beserta Wali Kelas.....	65
---	----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Gambar

Tabel 3.1 Model Interaktif Miles & Hubberman.....	52
Tabel 4.1 Peta Kel. Puspanegara.....	59
Tabel 4.2 Denah Lokasi YAPENI.....	64



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ragam masalah klasik yang masih bersemayam di lembaga-lembaga pendidikan khususnya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Negeri ini tidak miskin, tidak pula tergolong dalam beberapa negara miskin di dunia, namun mengapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia sedikit tertinggal dibanding lembaga pendidikan lainnya. Penyebabnya ialah belum maksimalnya program realisasi pemerataan dan pembiayaan pendidikan. Imbasnya hampir seluruh komponen pendidikan merasakannya, padahal komponen pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah di Indonesia. Hampir tidak ada satu lembaga pendidikan manapun yang mengabaikan masalah biaya, sehingga biaya merupakan penunjang dari seluruh kegiatan pendidikan, tanpanya proses pendidikan dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal.

Secara aplikatif, kesuksesan pembiayaan pendidikan di tentukan oleh SDM yang ada, SDM bisa berupa sumber dana dan juga pelaku yang mengelola biaya pendidikan tersebut baik pada tatanan hulu sampai ke hilir. Produktifitas manusia sebagai pelaku dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia menjadi salah satu tolak ukur suksesi program realisasi pemerataan biaya pendidikan di Indonesia.

Ada istilah mengatakan, Manusia adalah subyek pendidikan, dan juga obyek pendidikan, artinya, manusia dalam proses perkembangan kepribadian, baik menuju pembudayaan maupun proses kematangan dan integritas. Manusia sebagai objek pendidikan diartikan sebagai

sasaran atau bahan yang dibina. Meskipun kita sadari bahwa perkembangan kepribadian adalah self development melalui self activities, jadi sebagai subjek yang sadar mengembangkan diri sendiri.¹ Sebagaimana pepatah cina menyebutkan “*Jika Anda berencana untuk satu tahun, tanamlah padi. Jika Anda berencana selama sepuluh tahun, tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama 100 tahun, didiklah manusia*”.

Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya, peribahasa tersebut menjelaskan tentang sebuah perbandingan aturan yang terjadi di suatu wilayah bisa juga berbeda di wilayah lainnya. Sebagai contoh zaman kekhalifahan, pada saat itu, tidak hanya rasa aman, makmur dan sejahtera yang dirasakan masyarakatnya, tapi juga akses pendidikan gratis bagi masyarakatnya. Pelaku pendidikan pada zaman tersebut dapat dikatakan baik sekali, mereka dapat mencari sumber dana dan mengelolanya secara efektif dan efisien. Tidak sampai di sana kebijakakan dalam keputusan yang dikeluarkan khalifah pada saat itu menjadikan pendidikan Islam berkembang dengan pesat sampai ke penjuru dunia. Saat ini sejarah tinggallah masa lalu, dan kita tidak boleh melupakannya.

Historis tersebut tertular dengan gaya bahasa penyampaian yang berbeda, yakni Undang-undang 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Pemerataan tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan.

¹Noor Syam, Mohammad, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filasafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 153.

Dalam mencapainya Negara telah membuat delapan rambu-rambu yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)² yang merupakan standar minimal yang harus ditempuh dan diupayakan pencapaiannya oleh satuan pendidikan yang meliputi: (1). Standar kompetensi (2). Standar isi (3). Standar proses (4). Standar penilaian (5). Standar pendidik dan tenaga kependidikan (6). Standar sarana dan prasarana (7). Standar pengelolaan dan (8). Standar Pembiayaan. Delapan rambu-rambu berstandar nasional ini, yang nantinya dapat mewujudkan satuan pendidikan bermutu dan layak sehingga menghasilkan kualitas manusia sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Usaha peningkatan kualitas manusia melalui peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan, di antaranya pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat yang merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Wacana tetaplah jadi wacana, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan yang layak, karena berbagai factor termasuk biaya pendidikan yang tidak terjangkau masyarakat, meskipun aliran dana pendidikan tiap tahunnya meningkat dan subsidi pemerintah bagi masyarakat kurang mampu terus dikucurkan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN dan APBD agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Kenyataannya bahwa alokasi biaya pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD masih saja belum mencukupi

²Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bandung: PT. CitraUmbara

dan memadai, ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemberdayaan modal social dalam kemandirian pengadaaan sumber dana pendidikan dan strategi yang baik dalam mengelola dana tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak sedikit jumlahnya.

Meneropong pendidikan dari sektor ekonomi, pendidikan dapat dilihat kontribusi atas manfaatnya terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Adanya manfaat yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan dan pembaharuan yang terus mengalami perkembangan.

Biaya pendidikan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (2),³ yang berbunyi “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Selanjutnya untuk penyelenggaraan pembiayaan pendidikan harus pula ditunjang dengan suatu manajemen yang layak dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 dijelaskan dan disebutkan bahwa ayat 1: setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas sumber-sumber dana yang diperoleh, melainkan juga penggunaan dana yang efektif dan efisien. Semakin efisien sistem pendidikan yang dilaksanakan, maka semakin efisien biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Begitu pula semakin efektif pengelolaan dan penggunaan

³Undang –undang Rapublik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional , Bandung: PT. Granesa

dana maka semakin sehat arus dan sirkulasi keuangan di sekolah, yang berdampak pada maju dan lancarnya kegiatan-kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar.

Kata efektifitas dalam penggunaan biaya pendidikan berkaitan dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan dan dikerjakan dengan tepat guna mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Selain manajemen yang baik, faktor pembiayaan dan dukungan anggaran, merupakan upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan anggaran.

Suyadi⁴ seorang wali murid asal desa Kranggan memaparkan pandangannya terhadap manajemen pembiayaan pendidikan di lingkungan tempat ia berada. Menurutnya kondisi pembiayaan pendidikan di lingkungannya kurang kooperatif dengan *stakeholder* pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, ini ditandai dengan enggannya lembaga pendidikan untuk diawasi oleh masyarakat terkait besaran dana yang dikeluarkan oleh orangtua dan alokasi penggunaan dana pendidikan. Secara umum resiko timbulnya kecurangan sangatlah mungkin terjadi dikarenakan sukarnya lembaga pendidikan dalam mengungkapkan pendanaan pendidikan kepada masyarakat.

Bagian terpenting dalam hal ini ialah perlu adanya keterbukaan atau transparansi dari pihak sekolah kepada wali murid terkait permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan. Pihak sekolah, Komite sekolah, Pejabat pemerintah, dan seluruh yang terlibat dalam permasalahan ini diharapkan membuka diri agar menerima kritik dan saran dari orang tua

⁴Wawancara dengan Suyadi, tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan, di Perum Cagak Gunung Putri, tanggal 27 Desember 2015.

atau wali murid. Sekolah harus dikembalikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang dapat memanusiakan manusia agar terwujudnya cita-cita mulia para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945⁵.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas penulis ingin melihat langsung proses manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah. Penulis melirik adanya potensi untuk ditelaah lebih dalam ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Pada Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara-Bogor”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian ini akan memfokuskan pada Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam pada Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara-Bogor
2. Adapun Pertanyaan yang ingin dicari jawabannya ialah:
 - a. Bagaimanakah proses manajemen pembiayaan Pendidikan Islam pada madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara-Bogor yang meliputi tahapan (Budgeting, Accounting, Auditing) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai oleh peneliti melalui serangkaian aktifitas penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai ialah

1. Mengetahui bagaimanakah manajemen pembiayaan Pendidikan pada madrasah Tsanawiyah di Kelurahan

⁵Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan”.

Puspanegara-Bogor yang meliputi tahapan Budgeting, Accounting, Auditing

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti :

Sebagai kontribusi positif bagi peneliti untuk menganalisis lebih jauh mengenai sistem manajemen pembiayaan pada Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Puspanegara-Bogor

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat *contribution of knowledge*, mempunyai nilai kontributif bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian atau penulisan selanjutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Munir⁶ dalam jurnalnya yang membahas tentang “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam”, yang diterbitkan oleh *ejournal* unida gontor tahun 2013 berisikan bahwa pembiayaan pendidikan dalam Islam merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul dan khalifah penggantinya. Tulisannya juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami pendidikan Islam saat ini ialah keterbatasan sumber dana dan SDM yang kurang mumpuni dalam menyusun, mengelola, dan mencari sumber dana lain di luar dari sumber yang berasal dari pemerintah. Jika pada zaman dahulu harta rampasan perang dapat dialokasikan kepada pendidikan, seperti yang dilakukan pada ke-khalifahan Umar dan Ustman, maka sekarang pun hemat penulis hal tersebut dapat diterapkan kembali tentunya dengan perang yang berbeda, yakni perang melawan praktek korupsi yang menggrogoti bangsa ini, hingga imbasnya merusak tatanan pembiayaan termasuk pendidikan.
2. Fatahillah⁷ dalam tulisan tesisnya tentang “Manajemen Pembiayaan Pendidikan bagi Anak kurang mampu di Pondok Pesantren Al-Ishlah Dadapan Bondowoso”. Tulisannya menjelaskan tentang kendala yang dialami dunia pendidikan dalam kemampuan finansial keterkaitannya dengan pembiayaan pendidikan, hampir semua jenis pendidikan

⁶Ahmad Munir, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*”, *ejournal* yang diterbitkan unida gontor, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013

⁷Arrozi Fatahillah, (“Manajemen Pembiayaan Pendidikan bagi Anak kurang mampu di Pondok Pesantren Al-Ishlah Dadapan Bondowoso”), *Tesis*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2011.

mengalami hal tersebut, namun dalam tesisnya peneliti memfokuskan pertanyaan penelitiannya yang meliputi pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya studi kasus. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah analisis domain, taksonomi, komprehensial, dan analisis tema. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Pimpinan Pondok pesantren Al-Ishlah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu mengedepankan hal-hal seperti (a) Melibatkan semua pengurus, (b) Merumuskan perencanaan yang fleksibel, dan (c) Mendasarkan kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu agar supaya tercapai visi, misi dan tujuan pondok pesantren. (2) Pengorganisasian pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dijalankan dengan: (a) Pembagian tugas yang jelas serta pendelegasian wewenang, (b) Penempatan personel yang amanah dan kompeten, dan (c) Melakukan pembinaan personel secara rutin dan berkala. (3) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu meliputi: (a) Membagi santri ke dalam tiga golongan, yaitu Banuh, Basa dan Taba, (b) Penerimaan sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari sumbangan santri mampu dan BUMS, (c) Alokasi penggunaan pembiayaan pendidikan yang terprogram, dan (d) Prosedur pencairan pembiayaan pendidikan yang terorganisir dan rapi. (4) Pengawasan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dilakukan dalam dua tahap: (a) Dijalankan oleh biro pengawasan secara insidental dan berkala, dan (b) Dijalankan oleh pimpinan pondok dan wakil secara insidental dan berkala.

Penelitian diatas memfokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan bagi anak yang kurang mampu, dalam tulisannya peneliti menggunakan rangkaian proses manajemen pembiayaan pendidikan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Rangkaian proses tersebut memang bagian dari sebuah manajemen pembiayaan pendidikan dan kita akan temui di penelitian-penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berbeda.

3. Baihaqi, Nasir Usman, dan Cut Zahri⁸ dalam Jurnal Administrasi Pendidikan mengatakan bahwa “ *The Mangement of education funding is the process of setting up and managing costs effectively and efficiently in education financing business. The cost of education is a very important component in education. The process of education cannot work without the support costs.* Dapat diartikan sebagai berikut : Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

Penelitian ini mengangkat tema “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar”. Menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta Komite sekolah di SMK Aceh Besar.

Dalam tulisannya dijelaskan juga bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pendidikan. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan,

⁸Baihaqi dan Nasir Usman, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Admministrasi Pendidikan Pascasarjana Unsyiah Kuala Banda Aceh*, (1 Aguustus 2012), Vol. I, No. 1, hal, 29-30, kolom 2.

diantaranya peningkatan sarana dan mutu pendidikan. Kerjasama pihak pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat tidak merupakan suatu sistem yang lepas. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.⁹

Hasil penelitian menunjukkan dalam rencana anggaran, dan pendapatan sekolah secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua bagian dengan kegiatan berbeda yaitu; penerimaan dan pengeluarannya. Temuan di lapangan SMK di Kabupaten Aceh Besar penerimaan keuangan berasal dari sumber-sumber yang dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik secara teoritis maupun peraturan pemerintah. Menurut hasil wawancara, prosedur penerimaan keuangan SMK Kabupaten Aceh Besar diketahui terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluaran, sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Pola manajemen keuangan sekolah terbatas pada pengelolaan dan tingkat operasional.

Berdasarkan observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan, salah satu kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari bantuan dari luar seperti halnya bantuan pihak donatur. Cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan dari pihak luar yang diperoleh memang tidak terlalu banyak, namun proses

⁹*Ibid.*,

penggunaannya tetap meminta petunjuk dari Dinas Pendidikan Aceh Besar.

Pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh kepala sekolah dan pembantu wakil kepala sekolah. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh wakil kepala sekolah atau bendaharawan.

Sama halnya dengan penelitian diatas, Baihaqi dkk mengangkat tema seputar manajemen pembiayaan pendidikan, seperti yang dikatakan diatas dalam penelitian ini pun kita dapat temui rangkaian sebuah manajemen pembiayaan pendidikan, namun Baihaqi dkk memfokuskan pada dua rangkaian proses yakni penerimaan dan pengeluarannya. Meskipun peneliti pun menyinggung sedikit tentang pengawasan atau menggunakan istilahnya pemantauan. Letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya kecilnya ialah *pertama* situs lokasi tempat penelitian berlangsung, *kedua* objek dan subjek penelitiannya berbeda.

Adapun letak perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian milik Baihaqi dkk ialah *pertama* penelitian terdahulu hanya memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas sebagai acuan dalam penyusunan program pembiayaan sekolah, sedangkan penelitian sekarang ingin melihat apakah ada aspek lain yang menjadi acuan dalam penyusunan program pembiayaan sekolah, *kedua* selain Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian terdahulu, penelitian saat ini menambahkan Dinas Pendidikan / UPT Pendidikan III di Kecamatan Citeureup sebagai subjek penelitiannya.

4. Sukino¹⁰ dalam tulisan tesisnya yang berjudul “Upaya Orangtua Siswa dalam Pembiayaan Pendidikan”. dalam tulisannya mendeskripsikan kondisi orang tua dalam pembiayaan pendidikan, serta mendeskripsikan usaha orang tua dalam sumbangan pendidikan dan pembiayaan operasional sekolah. Jenis penelitiannya kualitatif dengan subjek penelitian orang tua siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis interaktif keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban membayar pengembangan pendidikan, yang dipergunakan dalam pengembangan sekolah yang besaran pengeluarannya telah disepakati oleh pihak sekolah, orang tua siswa dan komite sekolah sehingga satu sama lain saling memberikan masukan dan memutuskan bersama-sama, sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Berbeda hal dengan penelitian sebelumnya, Sukino mencoba menjelaskan upaya orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan. Tema ini sangat berkaitan dengan sebuah manajemen pembiayaan pendidikan yang dalam rangkain prosesnya terdapat sebuah tahapan “pengorganisasian/pembukuan”. Dalam praktiknya pengorganisasian meliputi pendapatan dan pengeluaran, dalam pendapatan upaya orang tua dalam pembiayaan pendidikan merupakan sumber-sumber dana intern yang diperoleh lembaga pendidikan dari SPP atau kewajiban orang tua dalam mengembangkan pendidikan. Upaya orang tua inilah yang menurut penulis memiliki keselarasan dengan tema yang diangkat

¹⁰Sukino, “Usaha Orangtua Siswa dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinon Klaten)”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

5. Armida¹¹ dalam jurnal penelitiannya membahas tentang “Sistem Anggaran Pendidikan” (studi tentang penganggaran pendidikan dan efektifitas penggunaan biaya pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kota Jambi). Penelitiannya mengkaji bagaimana kondisi aktual sistem penganggaran pendidikan Madrasah Aliyah yang meliputi aspek penyusunan anggaran pendidikan, sumber penerimaan, pratek pengalokasian, penerapan pengawasan dan pertanggungjawaban. Implementasi anggaran tersebut dirilis dari realisasi anggaran dan penggunaan biaya terhadap aktivitas aktivitas pendidikan, sehingga kemudian diketahui indikator indikator yang efektif terhadap penggunaan biaya pendidikan dan dampaknya yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di unit-unit MA yang diteliti di Kota Jambi.

Penelitiannya bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, oleh karena itu rancangan penelitiannya ialah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif perkembangan subjek masalah yang sedang diteliti dalam sesi tertentu. Situs lokasi yang diambil ialah Madrasah Aliyah di kota Jambi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) studi dokumentasi. Adapun subjek penelitiannya ialah Kepala MA, WAKA MA dalam berbagai bidang bendaharawan MA, pengelola anggaran Kantor Kementerian Agama, termasuk KPPN di propinsi, guru, siswa dan pengguna jasa pendidikan MA yang dianggap terlibat atau mengetahui tentang sistem anggaran pendidikan MA.

¹¹Armida, “Sistem Anggaran Pendidikan” (Studi Tentang Penganggaran Pendidikan dan Efektifitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi).*Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, (2 Oktober 2012), Vol. 13, No. 2, hal. 1, Kolom.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam sistem penganggaran pendidikan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan madrasah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penganggaran pendidikan Madrasah Aliyah berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Secara khusus untuk menganalisis efektivitas penggunaan biaya pendidikan dan mengetahui mutu (*out put*) yang dihasilkan MA.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya adalah salah satu penentu berjalannya aktivitas aktivitas PBM, dan juga didukung oleh faktor faktor lain untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah, diantaranya ketepatan penggunaan biaya dengan sasaran tujuan pendidikan yang akan dicapai, komitmen kepemimpinan MA terhadap keputusan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Sedangkan anggaran pendidikan adalah berfungsi sebagai alat bantu penggerak sistem manajemen pengelolaan pendidikan madrasah diantaranya sistem anggaran pendidikan madrasah, dan sekaligus sebagai alat pengendalian pendeteksi berjalan tidaknya program pendidikan serta mengarahkan kepemimpinan kelembagaan kearah program yang lebih kuat dan bertindak efektif dan efisien, agar tepat sasaran dalam menjalankan aktivitas - aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila anggaran dianalogikan dengan darah dalam tubuh seseorang, dan jika terjadi porsi yang berlebihan dan kekurangan mengakibatkan tekanan darah menjadi tidak stabil, dan sirkulasi darahnya tidak dapat mengalir secara efektif dan efisien, dan terjadi penyumbatan pada anggota tertentu, sehingga seluruh anggota tubuh ikut merasa sakit. Jika demikian anggaran pendidikanpun dapat menghambat berjalannya aktivitas pendidikan.

Penelitian selanjutnya milik Armida yang membahas tentang efektifitas dan dampaknya dalam penggunaan sistem anggaran pendidikan. Diibartkan darah dalam tubuh yang mengalir dan dipompa keseluruh bagian tubuh, porsinya harus sesuai dengan yang dibutuhkan tidak kelebihan atau bahkan kekurangan, sama halnya suatu anggaran dalam sebuah lembaga pendidikan keberadaannya salah satu penentu berjalannya aktifitas KBM tidak kekurangan dan kelebihan agar tidak penyumbatan yang berakibat pada buruknya manajemen pembiayaan pendidikan dalam sistem anggaran pendidikan atau *budgeting*.

6. Nasta'in¹² dengan penelitiannya yang membahas tentang "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari Tersono Batang". Dalam tulisannya membahas bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS dalam meningkatkan mutu MIS Tanjungsari, dan ingin mengetahui bagaimana hasil mutu MIS Tanjungsari terhadap adanya bantuan BOS. Penelitiannya bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dengan proses penyajian data yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitiannya ialah (1). Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam meningkatkan mutu MIS Tanjungsari meliputi kegiatan perencanaan keuangan madrasah yang berupa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dengan dana BOS dan pengembangannya,

¹²Ahmad Nasta'in, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiah Tanjungsari Tersono Batang", *Thesis* Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, 2012

pelaksanaan pembiayaan pendidikan mencakup: penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban keuangan madrasah yang bertujuan untuk mengetahui semua program kerja madrasah apakah sudah berjalan sesuai target apa belum sehingga memungkinkan adanya perbaikan ke depannya. Pemeriksaannya dilakukan kepala sekolah sedangkan pertanggungjawaban keuangan madrasah kepada pihak madrasah, komite serta tim manajemen BOS tingkat kabupaten kota setempat. Sumber keuangan madrasah tidak hanya dari pemerintah saja tetapi dari wali murid, donatur, dan masyarakat, (2). Hasil mutu MIS Tanjungsari dengan adanya dana BOS mengalami peningkatan dengan pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, untuk guru melalui peningkatan profesionalisme dan tunjangan, pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti penambahan fasilitas belajar mengajar, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan mutu madrasah.

Ada apa dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan apa kaitannya dengan manajemen pembiayaan pendidikan ?, jawaban tersebut terdapat dalam sebuah penelitian milik Nasta'in yang membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan madrasah Ibtidaiyah salafiyah melalui dana bantuan BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diketahui BOS merupakan salah satu sumber dana yang dapat dianggarkan suatu lembaga pendidikan, besarnya tergantung pada faktor internal suatu institusi pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan. Berbicara mutu pendidikan maka kita berbicara tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah institusi pendidikan dan kemudian menjadi *goal* , sistem anggaran yang baik serta manajemen pembiayaan pendidikan yang sehat dapat mewujudkan hal tersebut, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, disinilah

terkadang kepiawaian orang-orang dibalik layar pendidikan dibutuhkan. Sehingga inilah manajemen setiap bagiannya saling *support* satu dengan lainnya.

7. Budaya¹³ dalam penelitian disertasinya yang membahas tentang “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu)*”. Fokus dalam penelitiannya ialah sekolah merencanakan, mengupayakan, mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pembiayaan sekolah, sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitiannya adalah : (1). memaparkan cara pelaksanaan satuan pendidikan sekolah dasar, merencanakan anggaran pendapatan belanja sekolah, (2). mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah, (3). melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah, (4). mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengambil tiga situs lokasi penelitian yakni; SD Panglima Sudirman Kota Batu, SD Abdul Rahman Kota Batu, dan SD Welirang Kota Batu yang dianggap memiliki karakteristik khusus dalam reformasi bidang pendidikan di Kota Batu.

Hasil penelitiannya ialah sebagai berikut : (1) pelaksanaan sekolah dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (a) merencanakan pembiayaan sekolah yang diilhami oleh visi dan misi, (b) didasarkan adanya identifikasi kebutuhan sekolah dan melibatkan seluruh komponen sekolah, (c) dikonsultasikan kepada komite sekolah, (2) mengupayakan anggaran

¹³Budi Budaya, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu)”, Disertasi Doktor, Malang; Universitas Negeri Malang, 2011

pendapatan dan belanja sekolah dapat digali melalui (a) sumber dari pemerintah pusat dan daerah, (b) masyarakat dan wali murid serta kegiatan usaha sekolah, (c) melalui kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan industri, (3) dalam evaluasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah maka sekolah akan melibatkan beberapa pihak: (a) melibatkan pihak sekolah dan komite sekolah dalam melakukan evaluasi, (b) melakukan evaluasi secara rutin baik secara formatif maupun sumatif, (c) dalam mengevaluasi sekolah menggali saran dan masukan dari komponen sekolah, (4) dalam mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah ada beberapa laporan: (a) laporan pertanggung-jawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah yang diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholdernya, (b) laporan disusun yang berorientasi akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi, (c) membuat laporan kemajuan berkala atau progress report oleh pihak sekolah sehingga akan menghasilkan pembiayaan yang efektif.

Penelitian selanjutnya merupakan disertasi doktor milik Budi Budaya yang mengangkat tema penelitian manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif, fokus penelitiannya tetap seputar penganggaran/perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban/*audit*. Hasil penelitiannya sangat memperhatikan faktor-faktor internal yang dapat berpengaruh pada manajemen pembiayaan pendidikan sehingga efektif dan membawa hasil bagi suatu lembaga pendidikan. Dalam disertasinya ini ditemukan hal baru yang dapat dijadikan acuan teknis dalam rangkaian proses penganggaran, penggunaan, sampai kepada tahap pertanggungjawaban.

8. Nurbakin¹⁴ dalam penelitiannya tentang “Pengelolaan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang”. Tujuan penelitiannya ialah (1).Mendeskripsikan karakteristik sumber dana di Dinas Pendidikan Kota magelang, (2). Mendeskripsikan karakteristik alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang, (3).Mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang. Jenis penelitiannya kualitatif dengan etnografi sebagai desain penelitiannya, adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kasubag Keuangan, Kasubag Program dan Bendahara.

Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan partisipasi dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka terhadap informan. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tulisan, rekaman seperti buku-buku pedoman, laporan resmi, catatan harian, notulen rapat. Analisis data dalam penelitiannya menggunakan tahapan Miles dan Huberman yang terdiri tiga komponen yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitiannya sebagai berikut (1). Sumber dana di Dinas Pendidikan Kota Magelang berasal dari tiga sumber yaitu APBN pusat, APBD provinsi, dari APBD Kota Magelang Besar sumber dana yang akan diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang di atas 20% dari masing-masing anggaran belanja. Untuk mendapatkan sumber dana, pengelola keuangan Dinas Pendidikan Kota Magelang menyusun RKA yang akan dievaluasi oleh TAPD dan DPRD Kota Magelang yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPA.

¹⁴Taufiq Nurbakin, “Pengelolaan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

Ada kalanya Dinas Pendidikan Kota Magelang bekerja sama dengan sponsor dalam kegiatan tertentu untuk mendapatkan tambahan sumber dana. Sumber dana yang diterima akan digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Sumber dana yang diterima melalui rekening bank Dinas Pendidikan Kota Magelang akan dipublikasikan secara transparan melalui media cetak nasional, (2). Alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Alokasi dana disusun untuk dua kategori yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. (3). Pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala dan bendahara Dinas Pendidikan Kota Magelang. Laporan disusun dengan memperhatikan aspek legalitas hukum dan kebermanfaatan. Laporan pengelolaan dana pendidikan berisi rekapitulasi penggunaan belanja langsung dan tidak langsung berserta rinciannya.

Berbeda dengan ke-enam penelitian sebelumnya, Nurbakin dalam tesisnya membahas pengelolaan biaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang, dalam penelitiannya Nurbakin mencoba menggali bagaimanakah sirkulasi sumber dana yang berjalan di Dinas Pendidikan Kota Magelang. Hasilnya dapat memberikan kita pemahaman dan pengetahuan bagaimanakah perputaran sumber dana pada pemerintahana sebelum dialokasikan kepada seluruh lembaga pendidikan di bawah naungannya. Sumber dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pendidikan dalam bentuk rangkaian manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi *budgeting* atau penganggaran sampai kepada tahap pertanggungjawaban, yang terpenting ialah mengatur uang yang dijatahkan pemerintah secara efektif dan efisien.

9. Adi Dewanto dan Rahmania Utari¹⁵ dalam jurnal ekonomi dan pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta membahas tentang “Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah”. Dalam tulisannya lebih membicarakan pengelolaan modal sosial pada aspek memperoleh dana pendidikan, dan perencanaan/penganggaran. Tulisannya juga dilatar belakangi oleh keterbatasan sumber dana pendidikan di Indonesia merupakan issue yang tak kunjung henti bergulir terlebih dengan keberadaan pemerintah yang tak kunjung menyanggupi besaran subsidi sektor pendidikan sejumlah 20 %. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dituduh sebagai upaya untuk meminimalisir peran pemerintah dalam pendidikan, khususnya pada aspek sumber pembiayaan pendidikan. MPMBS dikenal dengan sistem otonomi sekolah, otonomi sekolah mendatangkan tantangan yang tidak hanya seputar mengolah sumber dana yang masuk ke sekolah, namun juga keterampilan kepala sekolah dalam mengembangkan sumber daya yang dapat melahirkan sumber dana pendidikan. Keterampilan pimpinan sekolah dalam menjalin kerjasama, membangun jaringan kemitraan, dan mempromosikan lembaga juga dapat dijadikan faktor penghambat berkembangnya sumber-sumber pendapatan sekolah jika pimpinan sekolah tidak memiliki kemampuan tersebut. Sehingga dari sisi eksternal modal sosial yang dimaksud tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam tulisannya disimpulkan bahwa Modal sosial hanyalah salah satu diantara modal lainnya yang mendukung pendanaan pendidikan pada level makro maupun mikro. Pemberdayaan modal sosial bukan dimaknai sebagai aksi mengeksploitasi masyarakat sebagai sumber dana sekolah, namun lebih kepada bagaimana sekolah bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola modal sosial yang ada pada

¹⁵ Adi Dewanto dan Rahmania Utari, “Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* (1 April 2006), vol 3, No. 1, hal 25-26, kolom 1-2.

masyarakat/stakeholders. Sikap optimisme perlu ditumbuhkan kembangkan pada pihak sekolah bahwa modal sosial yang ada itu melimpah, namun untuk efektivitas termanaftkannya diperlukan upaya-upaya tertentu yang memerlukan tidak hanya keterampilan teknis namun juga keterampilan sosial. Pemerintah tidak cukup hanya mencanangkan program MPMBS, namun juga memberikan *follow up* untuk dapat mengatasi konsekuensi pola MPMBS yang salah satunya ialah kemandirian dalam pendanaan pendidikan.

Menarik jika kita perhatikan seksama pemikiran yang digagas oleh Adi Dewanto dan Rahmania Utari ini membahas tentang pemberdayaan modal sosial dalam manajemen pembiayaan pendidikan sekolah, tulisannya berangkat dari minimnya RAPBN untuk anggaran pendidikan yang hanya sebesar 20% . yang menjadikan tulisan ini menarik ialah ungkapan bahwa pemberdayaan modal sosial merupakan jalan menuju kepada kemandirian dalam pendanaan pendidikan didukung dengan keterampilan pemimpin yang ada di suatu lembaga pendidikan. Pemberdayaan modal sosial dapat menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dalam sebuah manajemen pembiayaan pendidikan, kehadirannya dapat memberikan motivasi tersendiri dalam menghadapi minimnya anggaran dari pemerintah dan persaingan dalam dunia pendidikan.

10. Lantip Diat Prasojo¹⁶ dalam tulisannya pada jurnal internasional membahas tentang “*Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan*”. Yang mendasari tulisannya ialah penyediaan dana atau anggaran pendidikan yang umumnya diperlukan dalam jumlah nominal yang cukup besar, inilah yang menurut penulis menjadi permasalahan dalam

¹⁶Lantip Diat Prasojo, “Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan”, *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, vol 4, No. 2010, hal 19

penyelenggaraan pendidikan. Mengacu pada konsep efektifitas dan efisiensi, secara operasional alokasi dana pendidikan memerlukan perhatian khusus, karena sektor pendidikan merupakan pelayanan publik yang lebih mengarah kepada kepentingan politik yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Demikian jelaslah bahwa besaran anggaran pendidikan yang dibutuhkan merupakan implikasi dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dengan kata lain hubungan biaya pendidikan berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam tulisannya disimpulkan bahwa sumber dana, SDM, dan *stakeholder* merupakan tiga faktor yang sangat penting dan terkait langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu dari kebijakan publik sehingga *stakeholder* juga menjadi perhatian penting, selain faktor dana dan SDM.

Ada persamaan konsep antara tulisan sebelumnya dengan tulisan yang digagas oleh Lantip Diat Prasajo yang membahas tentang *Financial Resources* sebagai faktor penentu dalam arah kebijakan pendidikan, menurutnya hubungan biaya pendidikan berbanding lurus dengan mutu pendidikan, pernyataan tersebut benar dan memang seperti itu seharusnya, persamaan lainnya ialah tiga faktor terkait dengan implikasi kebijakan pendidikan yakni sumber dana, SDM, dan *stakeholder*. Faktor SDM dan *stakeholder* jika dikelola dengan baik dapat menjadi modal sosial dalam bagian manajemen pembiayaan pendidikan.

11. Fattah dalam bukunya yang berjudul “Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah”. Mengatakan bahwa pada dasarnya anggaran pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect*

cost).¹⁷ Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*offortunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Maksud dari pernyataan di atas ialah, dana pendidikan sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi segala pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan sangat berhubungan dengan mutu pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pendidikan dengan dana sebagai penunjang peningkatan mutu diperlukan pengelolaan yang terencana agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik dari pengelola tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat satuan pendidikan.

12. Luluk Aryani Isusilaningtyas¹⁸ dalam tesis pada tahun 2015 yang membahas tentang “Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan strategi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam melalui manajemen pembiayaan pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁷N. Fattah., Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2008), hal. 23

¹⁸Luluk Aryani Isusilaningtyas “ Strategi Peningkatan Mutu lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang), *Tesis*, Salatiga, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Salatiga IAIN Salatiga, 2015

dengan latar alamiah sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini ialah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, para guru, komite sekolah, dan siswa. Analisis data menggunakan teknik yang sangat familiar yakni Miles dan Huberman yang terdiri dari kegiatan reduksi data, pemaparan data, penarikan kesimpulan. Setelah mengalami triangulasi data hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut : (1). Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu guru, yaitu menekankan pada profesionalisme dan disiplin serta komitmen tugas untuk meningkatkan mutu sekolah. (2). Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan dibidang seni, olahraga, keagamaan, pramuka, bahasa inggris dan kepribadian. (3). Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sumber pembiayaan menjalankan program peningkatan mutu untuk mendukung sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.

Strategi merupakan Ilmu dan Seni dengan menggunakan siasat cermat dalam memimpin serta menghadapi berbagai kondisi untuk mencapai sasaran khusus. Peningkatan jadi susunan berlapis menyatakan kualitas, perbandingan, atau keadaan yang sangat dipandang dari titik tertentu. Mutu menjadi sebuah ukuran baik buruk suatu benda, taraf bobot kualitas dan kepandaian. Prolog tersebut merupakan sambutan pembukaan dari penulis dalam memandang hasil karya dari Luluk Aryani Isulaningtyas Mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Salatiga yang mencoba mengurai masalah Peningkatan Mutu Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan yang terjadi di MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang. Dari karyanya

menghasilkan sebuah gagasan baru di bidang pendidikan Islam dalam meningkatkan mutunya yang mungkin agak tertinggal dari lembaga pendidikan non Islam. Sadar atau tidak lembaga pendidikan Islam di Indonesia eksistensinya mulai tergeser dengan pesaing lain yang lebih menghadirkan mutu dengan kualitas super yang disokong oleh pendanaan hebat dari berbagai instansi yang mendukungnya untuk berinvestasi. Lewat karyanya Luluk mencoba menghadirkan pandangan lain guna mengurai benang merah pada pendidikan Islam di Indonesia kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Berkat penelitiannya tersebut, kami peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil tulisannya sebagai tolak ukur guna melakukan penelitian demi penelitian berikutnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

13. Iin Indriati¹⁹ dalam tesisnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang membahas tentang “Hubungan Manajemen Keuangan BOS dan Kegiatan Operasional Sekolah dan Kinerja Guru di Sekolah Dasar Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”. Tesis yang selesai pada tahun 2011 ini berangkat dari pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, dalam menanggapi perihal tersebut pemerintah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada implementasinya menghadapi berbagai masalah. Latar belakang tersebut yang membuat Iin Indriati bergerak untuk meneliti permasalahan tersebut, adapun tujuan utama dari penelitiannya ialah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara manajemen keuangan BOS dengan kinerja guru, hubungan kegiatan operasional sekolah dengan kinerja guru dan hubungan secara bersama-sama antara manajemen

¹⁹Iin Indriati, “ Hubungan Manajemen Keuangan BOS dan Kegiatan Operasional Sekolah dengan Kinerja Guru di Sekolah Dasar seKecamatan Kesambi Kota Cirebon”. Tesis, Cirebon, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon IAIN Cirebon, 2011

keuangan BOS dan kegiatan operasional sekolah dengan kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, dan teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuisioner secara random. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen keuangan BOS dengan kinerja guru yang terbilang cukup kuat dengan nilai $r = 0,60$, artinya terdapat hubungan yang kuat antara manajemen keuangan BOS dengan kinerja guru. Hasil berikutnya ialah terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan operasional sekolah dengan kinerja guru tergolong sedang dengan nilai $r = 0,52$, artinya terdapat hubungan walaupun masuk kategori sedang. Hasil kurang positif ditunjukkan dari hubungan yang signifikan antara manajemen keuangan BOS dan kegiatan operasional sekolah dengan kinerja guru yang tergolong rendah dengan nilai $r = 0,34$, artinya terdapat hubungan antara manajemen keuangan BOS dan kegiatan operasional sekolah dengan kinerja guru secara simultan termasuk rendah.

Iin Indriati Magister dari Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang mencari sebuah hubungan antara Manajemen Keuangan BOS dan Kegiatan Operasional Sekolah dengan kinerja Guru di Sekolah Dasar seKecamatan Kesambi Kota Cirebon. Berbicara kinerja seorang Guru zaman sekarang merupakan sebuah kenafian yang tidak dapat disangkal bahwa Guru adalah manusia yang butuh kehidupan dan menghidupi. Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan dalam bekerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi dan kemampuan guru melemah jika dihubungkan dengan persoalan Manajemen keuangan di Sekolah. Kinerja guru digambarkan dalam sebuah lagu karya musisi senior Iwan Fals yang diberi judul "Guru Oemar Bakri" dalam lyricnya dikisahkan seorang Guru bernama Oemar Bakrie dengan yang membawa tas hitam dari kulit buaya sambil mengayuh

sepeda kumbang memberikan pelajaran ilmu pasti. Oemar Bakri seorang guru jujur berbakti yang banyak menciptakan Menteri, Profesor, Dokter, Insinyur, hingga mampu menjadikan otak siswa seperti otak Habibie, tapi sayang sungguh sayang jadi guru berbakti memang makan hati dan mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri. Demikianlah potongan lyric dari lagu musisi senior Iwan Fals yang mengisahkan keadaan seorang Guru saat itu, tapi apakah perubahan telah terjadi sekarang ini ?.Jika memang hasil penelitian di atas menunjukkan hasil yang rendah dalam hubungannya antara Manajemen Keuangan dan Kegiatan Operasional Sekolah dengan Kinerja Guru di Sekolah.Maka permasalahan tersebut perlu dicari jalan keluarnya sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat bersaing seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang setiap harinya bertambah dan terakumulasi.Setiap yang lahir berhak mengikuti program wajib belajar seperti yang dicanangkan pemerintah. Guru merupakan elemen terpenting dalam pendidikan yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kualitasnya, kuantitasnya, hingga kesejahteraannya. Hasil penelitian di atas jelas di nilai secara objektif karena mungkin stakeholder merasakan pelayanan yang diberikan guru melemah, tapi mungkin Manajemen Keuangan bukan salah satu factor penyebab rendahnya kinerja Guru di Sekolah Dasar seKecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Dari keseluruhan literature review di atas memberikan sebuah tolak ukur kepada peneliti-peneliti selajutnya dalam menghasilkan sebuah pandangan, gagasan, serta ilmu baru yang kebenarannya relative, karena sewaktu-waktu hasil penelitian ini terbantahkan dengan lahirnya teori baru dari sebuah pengamatan dan penelitian.

B. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya mobilisasi dan mengarahkan seluruh sumber daya yang kita miliki atau pendistribusian benefit pendidikan dan merupakan sebuah seni dalam memadukan seseorang yang mengatur dan diatur, mengarahkan dan diarahkan, atau memimpin dan dipimpin. Pembiayaan pendidikan juga berkaitan dengan distribusi beban pajak serta metode pengalihan pajak ke sekolah. sekedar mengingatkan pemaparan di atas sebelum lanjut kepada penjelasan dari berbagai terminologi di bawah ini, yang perlu di garis bawahi dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besaran uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.²⁰

Terminologi pertama manajemen / pengelolaan merupakan sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk tipe organisasi, termasuk organisasi pendidikan secara umum dan organisasi pendidikan islam khususnya. Manajemen berasal dari bahasa latin “*mamus*” dari bahasa perancis “*mono*” dan dari bahasa itali “*manage, menege dan meneggiare* yang berarti melatih kuda dalam melangkah-langkahkan kakinya.”²¹ Manajemen pembiayaan pendidikan berarti mengatur, mengurus atau mengelola dana pendidikan. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu : Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian

²⁰Thomas H Jhones, *Introduction to School Finance Technique An Social Policy*, (New York : Macmillan Publishing Company, 1985), hal. 12.

²¹Soeharni Koswara dan Ade Yeni Nuryantini.. *Manajemen Lembaga Pendidikan*.(Bandung : Patragading,2002), hal 1.

kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²²

Wujud dari manajemen yang baik terletak seberapa pelaksanaan organizing yang utuh, kekompakan dan terciptanya suatu mekanisme yang sehat, dapat memperlancar, dan membuat stabil suatu organisasi.²³ Pentingnya kekompakan yang utuh juga disampaikan dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” Dalam memelihara keutuhan kekompakan, suatu organisasi, maka Al-Qur'an kembali memberikan arahan agar dalam satu wadah organisasi, kelompok, atau persaudaraan tidak terjadi pertentangan, percekungan yang mengakibatkan rusaknya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina dan

²² Administrasi pendidikan memiliki kemiripan makna, dari istilah Belanda “*administratie*”, yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Walter S. Monroe dalam bukunya “*Encyclopedia of Educational Research*” mengartikan administrasi pendidikan sebagai berikut : administrasi pendidikan adalah pengarahan, pengawasan pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan sekolah, termasuk administrasi pembiayaan.

²³ Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Pustaka al-Husna, Jakarta: 1983), Hal. 71.

kelola. Surat ke - 8 dalam Al-Qur'an menggambarkan sebagai berikut "Dan taatilah Allah dan RasulNya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Anfal : 46).

Sesungguhnya dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.²⁴

Demikian, karena negara berkewajiban secara langsung dalam menjamin tiga hal pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Masyarakat harus mendapatkan ketiganya secara cuma-Cuma sebagai hak rakyat atas negara.

Selaras dengan pemaparan di atas Nanang Fattah mengatakan bahwa biaya pendidikan ialah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan professional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan dan ketatusahaan sekolah.²⁵

²⁴Shiddiq Al-Jawi, *Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam*, Jurnal House of Khilafah, 2007, hlm. 1.

²⁵Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Rosda Karya, Bandung : 2000), Hal. 112

Diperkuat oleh Mulyasa²⁶ yang berpendapat bahwa uang memainkan perannya dalam pendidikan dalam tiga area; *pertama*, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; *kedua*, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik; dan *ketiga*, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan.

Mulyasa menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi 3 fase yaitu :

1. Financial Planning
Merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.
2. Implementation
Kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan
3. Evaluation
Proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran

Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang

²⁶E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Rosda Karya, Bandung : 2002) Hal. 195

serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

Mengapa pengelolaan keuangan dalam pendidikan Islam dianggap penting ? sebab, pendidikan dianggap sebagai suatu proses produksi yang menghasilkan lulusan berkualitas. Raymond C. Gibson mengungkapkan tentang produk pendidikan sebagai berikut *"The production and distribution of knowledge has become the greater enterprise in American, both in terms of cost and interns of long range consequences. This has probably been true in all societies that have struggled to survive, but the world has new reached a point in space and time where the principal element of power is education."* "bahwa produksi dan distribusi ilmu pengetahuan di Amerika telah berkembang menjadi perusahaan terbesar dan unsur kekuasaan utama dewasa ini berupa pendidikan dan pendidikan adalah investasi manusia" ²⁷

Pendidikan merupakan investasi, dengan demikian agar pendidikan mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengelolaan pembiayaan pendidikan meliputi pengaturan penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan.

Karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan :

1. Biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan dinyatakan dalam satuan Unit COST (Unit Satuan Terkecil; Cost=biaya). Tinjauan unit cost bisa bermacam-macam menurut luasnya factor yang diperhitungkan. Unit Cost lengkap, yaitu perhitungan unit Cost berdasarkan fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan yang

²⁷Koswara dan Nuryantini, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, (Patragading, Bandung : 2002), Hal. 135

termasuk: gedung, lapangan, gaji guru, personil, pembiayaan bahan dan alat, pembiayaan program baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.²⁸

2. Unit Cost setengah lengkap, yaitu hanya memperhitungkan biaya kebutuhan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktu berbeda misalnya seperti; kapur tulis yang tidak seimbang jangka waktu habisnya jika dibandingkan dengan meja, kursi yang dipakai siswa.²⁹
3. Unit Cost sempit, yaitu Unit Cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar menyangkut buku, alat pelajaran dan alat peraga.³⁰

Masalah Keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan, sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Adapun kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Budgeting (penyusunan anggaran)

Setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itu, anggaran ini masih bersifat sebagai rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang. Administrasi sekolah yang baik meminta anggaran belanja yang direncanakan dengan teliti dan penggunaannya yang efektif. Pada dasarnya

²⁸Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta : Aditya Media Yogyakarta dengan FIP, 2012), hal. 236

²⁹*Ibid.*,

³⁰*Ibid.*,

anggaran belanja adalah suatu pernyataan sumber-sumber keuangan yang terurai yang perlu untuk melaksanakan berbagai program sekolah selama periode satu tahun fiskal. Proses pertumbuhan anggaran pendidikan melibat penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasi sekolah.

Mulyasa dalam (Armida, 2012 : 4) Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (*fiscal*), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan.³¹

Supriadi mengatakan bahwa: perencanaan pendidikan pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro maupun mikro sangatlah diperlukan.³² Seluruh komponen pendidikan erat kaitannya dengan pembiayaan, meskipun tidak sepenuhnya masalah biaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah. Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan anggaran biaya yang relatif besar.

³¹Armida, "Sistem Anggaran Pendidikan" *Ibid.*, hal. 4-5, Kolom. 6-7

³²D. Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 3.

Dalam pembiayaan terdapat uang negara, sebagaimana dalam penyusunan anggaran uang tersebut diatur dengan beberapa ketentuan atau azas agar uang yang dijatahkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Maka dalam penyusunan anggaran terdapat tiga azas atau ketentuan diantaranya ialah : ³³

a. Azas Plafond

Artinya anggaran belanja tidak boleh melebihi jumlah tertinggi dari standar yang ditentukan. Misalnya dalam RAPBN telah ditentukan bahwa besaran anggaran pendidikan adalah 20 %, maka walaupun ada kebutuhan yang mendesak, permintaan tidak boleh melebihi anggarannya serta kekurangannya dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

b. Azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran

Pengeluaran belanja harus didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya pembelian sarana olahraga ditetapkan sebesar 2 Juta Rupiah, ternyata tidak cukup, maka kita tidak boleh menggeser uang di Devisi lainnya. Setiap anggaran yang disetujui telah pula dibagi-bagi menurut anggaran masing-masing.

c. Azas tidak langsung

Yaitu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan

³³Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Op Cit* hal. 233.

secara langsung untuk keperluan pengeluaran. Setiap penerimaan uang, misalnya SPP di sekolah harus disetorkan dahulu ke Bank atau Kas Negara, kemudian jika kita akan minta hak yang telah dialokasikan, baru kemudian mengajukan permintaan ke kas negara.

Pada setiap tahunnya anggaran pendidikan mengalami kenaikan dan perubahan, alasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu internal dan eksternal

1. Faktor Eksternal³⁴

a) Berkembangnya Demokrasi Pendidikan

Pada masa penjajahan misalnya, saat ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk meniknati pendidikan. Maka berkembangnya demokrasi pendidikan akan melepaskan masyarakat dari cengkraman penjajah.

b) Kebijakan Pemerintah

Pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan tersebut dapat tercapai pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas yang bersifat menunjang pendidikan misalnya :(1) Meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan Beasiswa (2). Kenaikan gaji guru dan lain sebagainya.

³⁴Faktor Eksternal ialah faktor yang ada di luar sistem pendidikan

c) Tuntutan akan pendidikan

Tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Dahulu orang sudah merasa puas dengan hanya mengeyam pendidikan sekolah dasar. Kekinian berubah mereka belum merasa puas jikalau belum menyandang gelar sarjana. Hal seperti ini dapat mempertinggi kualitas bangsa dan menaikkan taraf hidup. Tidak berhenti di sana, kini di samping tingkat pendidikan sebagai lambang status sosial bagi keluarga, sistem penggajian di Indonesia masih mempertimbangkan pendidikan (sistem skala ganda dalam penggajian)

d) Inflasi

Keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.

2. Faktor Internal ³⁵

a) Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan.

b) Pendekatan yang digunakan

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan Laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan metode lain dan pendekatan secara individual.

c) Materi yang disajikan

³⁵Faktor Internal ialah faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan

Materi pelajaran juga menuntut perubahan terhadap pembiayaan pendidikan pada praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang disampaikan dengan teori.

d) Tingkat dan Jenis Pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lainnya lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran jenis materi yang diajarkan, banyaknya yang guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya, dan lain sebagainya.

2. Accounting (pembukuan)

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah *"Accounting as the process indentifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information"*³⁶ yang artinya proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Kegiatan manajemen pembiayaan yang kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu (a) pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang (pengurusan tata usaha), (b) pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni

³⁶Wilopo, *"Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah"*. (Surabaya : Ventura STIE Perbanas, 2005), Hal :9

menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang (pengurusan bendaharawan). Berikut ini beberapa acuan yang dapat dijadikan suatu pedoman oleh bendaharawan dan kepala sekolah :

- a. Kepala Sekolah dan atau bendahara sekolah yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Kepala sekolah secara berkala wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah pada minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
- d. Kepala Sekolah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

a. Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan juga harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan anggaran belanja itu. Pendapatan sekolah pemerintah biasanya diperoleh dari sumber-sumber keuangan pemerintah sendiri, apakah itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dari keduanya, dan dari orang tua murid (SPP dan sumbangan-sumbangan lain). Pendapatan sekolah-sekolah swasta diperoleh dari sumber-

sumber sendiri, dari orang tua murid, dan bisa pula dari pemerintah dalam bentuk bantuan kepada sekolah swasta.

Sumber pendapatan atau Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite, besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas :

- a. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orangtua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa sekolah
- b. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur)
- c. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

Manajemen keuangan yang efektif di sekolah-sekolah meminta pengetahuan tentang sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi sekolah-sekolah dan tentang metode-metode penggunaan dana-dana ini bagi keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena usul-usul buat pengembangan atau penyesuaian program, tak dapat tidak, menimbulkan pertanyaan tentang biaya, administrator sekolah membutuhkan kecakapan dalam memajukan usul-usul untuk pengeluaran uang, dalam menterjemahkan usul-usul itu dalam kata-kata keuangan, dan dalam menunjukkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Pembuatan yang kompeten

juga meliputi pengelolaan secara efisien dana-dana yang diperoleh dari pendapatan intern seperti dana-dana yang berasal dari SPP, dari BP3 dan dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.³⁷

b. Pengeluaran

Penentuan pengeluaran biaya pendidikan melibat pertimbangan tentang tiap kategori anggaran belanja yang berikut :

1. Pengawasan umum. Dalam kategori ini termasuk sumber-sumber keuangan yang ditetapkan bagi pelaksanaan tugas-tugas administrative dan managerial. Gaji para administrator, para pembantu administrative, serta biaya perlengkapan kantor dan perbekalan semuanya tercakup dalam kategori pengawasan umum.
2. Pengajaran. Kategori ini meliputi gaji guru dan pengeluaran bagi buku-buku pelajaran, alat-alat, dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengajaran. Biasanya kategori ini merupakan 70-75% dari keseluruhan anggaran belanja.
3. Pelayanan bantuan. Pengeluaran yang bertalian dengan pelayanan-pelayanan kesehatan, bimbingan, dan perpustakaan termasuk dalam kategori ini.
4. Pemeliharaan gedung. Penggantian dan perbaikan perlengkapan, pemeliharaan

³⁷Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, (Bandung : Angkasa, 1985), hal. 128

gedung dan halaman sekolah adalah contoh-contoh bagian dari kategori ini.

5. Operasi. Biaya telepon, air, listrik, sewa gedung dan tana, dan gaji personil pemeliharaan gedung termasuk dalam kategori ini.
6. Pengeluaran tetap pengeluaran modal, jasa hutang, dan perkiraan pendapatan.

Kategori-kategori anggaran belanja ini merupakan bagian-bagian penting dari anggaran belanja pendidikan dari unit administrative sistem sekolah di tingkat mikro (misalnya anggaran belanja pendidikan dasar di suatu wilayah sekolah). Para kepala sekolah tidak mempunyai tanggung jawab tentang pengelolaan anggaran belanja ini. Tanggung jawab kepala sekolah hanya mengenai dana-dana untuk pengeluaran kecil: untuk menutup biaya telepon, air, listrik, dan pembelian serta pemeliharaan kecil yang perlu bagi operasi sekolahnya mengadministrasi dana-dana ini dan membukukannya secara periodik.³⁸

Adapun biaya operasional sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 (4) mencakup tiga komponen, yaitu: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; dan (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (boardmarker/kapur, penghapus, tinta, kertas tik dan sebagainya); dan biaya operasional pendidikan tidak langsung yakni biaya pemeliharaan sarana dan

³⁸*Ibid.*, hal. 127

prasarana, daya listrik, telekomunikasi, dan sebagainya.³⁹

Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan di Madrasah Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip sebagai berikut : (1). Hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.(2). Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan (3). Keharusan penggunaan kemampuan.

Mujamil Qomar memberikan rumusan terkait dengan penggunaan keuangan bagi lembaga pendidikan Islam harus menjaga kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Penggunaan dana harus benar-benar sesuai dengan program yang direncanakan
2. Anggaran harus digunakan se-efisien dan efektif mungkin, menghindari terjadinya kecurangan *mark up* pembelian atau pengadaan barang
3. Hindari kesan bahwa kegiatan sekolah sekedar untuk menghabiskan dana sehingga harus dilakukan penghematan
4. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku⁴⁰

³⁹Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 62

⁴⁰Sutikno, M. Sobri. Manajemen Pendidikan, *Op.Cit* Hal. 90

3. Auditing (pemeriksaan)⁴¹

Ragam pendapat tentang auditing yang diutarakan para ahli diantara ialah menurut Alvin Arens et.al, auditing ialah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari satu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Mulyadi memiliki pandangan lain perihal auditing, yang menurutnya ialah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁴²

Ringkasnya auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Adapun jenis-jenis auditing antara lain ialah : (1). Audit laporan keuangan (2). Audit kepatuhan (3). Audit operasional

Proses auditing ini sangat penting dan bermanfaat sekurang-kurangnya bagi 4 pihak :

- a. Bagi bendaharawan yang bersangkutan
 1. Bekerja dengan arah yang sudah pasti
 2. Bekerja dalam target waktu yang sudah ditentukan
 3. Tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai

⁴¹Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, *Ibid* hal 232-233

⁴²Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), Hal. 9

4. Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya
 5. Ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang
- b. Bagi lembaga yang bersangkutan
1. Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka
 2. Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas
 3. Tidak saling mencurigai
 4. Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima
- c. Bagi atasannya
1. Dapat mengetahui bagian dan keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan
 2. Dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambataannya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya
 3. Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancaran pengeluaran
 4. Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan
 5. Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa datang
 6. Untuk arsip dari tahun ke tahun
- d. Bagi badan pemeriksa keuangan
1. Ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara
 2. Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.

Secara teoritis terdapat kemiripan antara pembiayaan pendidikan dengan pembiayaan lainnya, kemiripannya, karena pendidikan merupakan lembaga jasa yang menghasilkan keahlian dan keterampilan serta pengembangan karakter. Dalam penyelenggaraan pendidikan juga, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan yang meliputi uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan dan gaji serta perbaikan sarana prasarana.

Merujuk kepada pemahaman di atas, sangat jelas bahwa pada intinya biaya dalam penyelenggaraan pendidikan sangat ragam jenisnya. Adapun terkait dengan manajemen pembiayaan sebagai upaya suksesi program pendidikan, harus ditanggung oleh kepala sekolah, para pemilik yayasan, pemerintah, serta tenaga lain yang terlibat langsung maupun tidak dalam penganggaran dan pengelolaan pendidikan. Pasalnya, komponen tersebut menentukan baik dan tidaknya sebuah pengelolaan biaya pendidikan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁴³

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.⁴⁴

Sukmadinata menjelaskan Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena

⁴³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 234.

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 11.

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴⁵

Dapat disimpulkan oleh peneliti tentang jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil situs lokasi di Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Kelurahan Puspanegara adalah salah satu Kelurahan dari 2 (dua) Kelurahan yang ada di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan merupakan satu dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

3. Subjek Penelitian

Menurut Amirin, Subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti akan amati.⁴⁶

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah Informant dan key

⁴⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Tindakan*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 72.

⁴⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2013), hal. 91

Informant. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian. Adapun subjeknya adalah Masyarakat Desa Puspanegara, Kepala Sekolah, Staf Bendahara, Tenaga Pendidik, dan Disdik Se-tempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

a. Obervasi;

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui proses pelayanan pendidikan dasar pada masyarakat oleh pemerintah kota dan satuan pendidikan.

b. Wawancara;

Sugiyono (2010:194) mengatakan bahwa teknik pengumpulan ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau sedikit-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup mengenai pelayanan pendidikan dasar yang diterapkan oleh pemerintah kota dan satuan pendidikan.

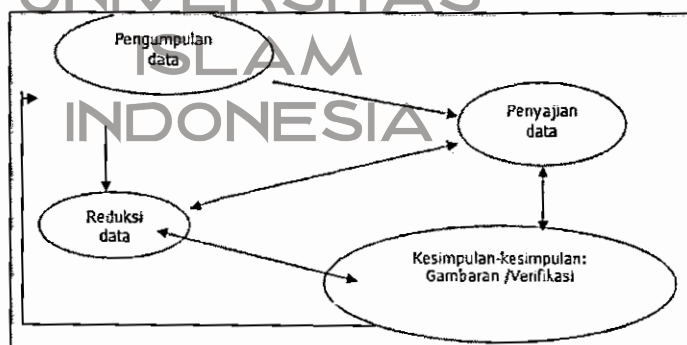
c. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴⁷

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman, yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁸ Miles dan Huberman juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Harap diingat bahwa kebanyakan data kualitatif adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan dengan menggunakan alat bantu seperti yang berupa kamera, *video tape*. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.



Gambar 3.1 Model Interaktif Milles & Huberman, 2014

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *op.cit* . hal. 201

⁴⁸*Ibid.*, hal . 246

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan, memo yang dikumpulkan dan dari lapangan.

3. Tahap Display Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data adalah penyajian data, yang dimaknai dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir pada proses ini ialah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

Untuk tahapan analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat, menyusun, serta memilih daftar pertanyaan yang tepat diajukan dalam proses wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan referensi dari unsur unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Melakukan wawancara dengan Kepala sekolah, Bendahara sekolah, disdik se-tempat, dan element pendukung yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan sekolah baik yang bersinggungan langsung atau pun tidak langsung.
3. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian
4. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan. Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi ke dalam 3 pembahasan, yaitu: (1). diskripsi lokasi penelitian, (2). diskripsi Informan Penelitian, (3). Hasil penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kelurahan Puspanegara adalah salah satu Kelurahan dari 2 (dua) Kelurahan yang ada di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan merupakan satu dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Berada di Ibu Kota Kecamatan Citeureup Kelurahan Puspanegara berdiri sejak bulan Juni 2001 yang sebelumnya berstatus Desa. Desa Puspanegara adalah hasil pemekaran dari Desa Citeureup pada Tahun 1979, Kemudian pada Tahun 1982 Desa Puspanegara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Puspanegara dan Desa Puspasari Secara Orbitasi Kelurahan Puspanegara terletak di sebelah Timur Laut dari Ibu Kota Kabupaten Bogor dengan Jarak 8 Km, jarak ke Ibu Kota Negara (Jakarta) 20 Km dan 184 Km ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung. Hal ini menjadikan potensi yang cukup sebagai penyangga yang menghubungkan Kota Bogor dengan Jakarta, selain letaknya yang memiliki jalur angkutan Jalan Tol Jagorawi.

Secara Alam Kelurahan Puspanegara beriklim Tropis sedang dengan suhu rata-rata 18-32 C dengan curah hujan 25-35 tahun. Koordinat 06.48427 Lintang Selatan, 106.88268 Bujur Timur. Kondisi alamnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian + 136 dpl. Kesuburan tanah cukup baik berpotensi untuk tanaman tingkat rendah dan tidak terdapat lahan kritis.

Luas Wilayah Kelurahan Puspanegara adalah 115 Ha terbagi dalam 4 Lingkungan, 11 RW, dan 38

RT yang masing-masing tersebar disepanjang Jalan Protokol dan Jalan desa dimana telah memberlakukan Sistem Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 1982 tentang Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Desa. Batas Wilayah Kelurahan Puspanegara meliputi :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri;
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Citeureup Kec. Citeureup;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karang asem Barat Kec. Citeureup;
- d. Sebelah Barat : berbatasan Dengan Desa Puspasari Kec. Citeureup

1) Keadaan Administrasi dan Pemerintahan

Kondisi Satuan Lingkungan Setempat berupa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan jumlah dusun/lingkungan tetap. Kelurahan Puspanegara pada tahun 2016 terdiri dari 38 RT dan 11 RW sebagai berikut :

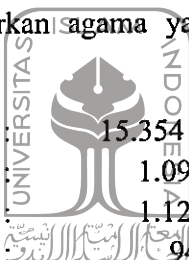
Jumlah Lingkungan 4 (empat) buah yaitu :

- a) Puspanegara terdiri dari 3 RW yaitu RW. 01, RW. 02 dan RW. 03;
- b) Kamurang terdiri dari 5 RW yaitu RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 08 dan RW. 11;
- c) Bojong terdiri dari 1 RW yaitu RW. 07;
- d) Kebon Kopi terdiri 2 RW yaitu RW. 09 dan RW. 10.

Setiap lingkungan tentunya mempunyai kepengurusan masing-masing yang dikepalai oleh Ketua RW/RT sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan. Sehingga jumlah Ketua RW/RT Se-Kelurahan Puspanegara semuanya telah terisi yang dapat dilihat dalam lampiran.

2) Keadaan Demografi, Sosial, Dan Ekonomi

Jumlah penduduk Kelurahan Puspanegara berdasarkan data terakhir bahwa jumlah penduduk yang ada adalah : 18.615 Jiwa, Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.996 KK. Mengenai keadaan penduduk berdasarkan agama yang dianutnya sebagai berikut :



a) Islam	15.354 Orang,	82,7 %
b) Katholik	1.099 Orang,	5,8 %
c) Protestan	1.128 Orang,	5,9 %
d) Hindu	94 Orang,	0,5 %
e) Budha	376 Orang,	1,9 %
f) Konghucu	564 Orang,	2,9 %

Sehingga dari table di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Puspanegara beragama Islam (82,7 %).

Penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut :

a) Pengrajin	:	2	Orang
b) Buruh Industri	:	6.335	Orang
c) Buruh Bangunan	:	30	Orang
d) Pedagang	:	180	Orang
e) Pengemudi	:	114	Orang
f) Pegawai Negeri Sipil	:	54	Orang
g) TNI/POLRI	:	4	Orang

h) Pensiunan (TNI/POLRI/PNS): 45 Orang

Kondisi sosial dibidang pendidikan, Penduduk Desa Puspanegara dilihat dari bidang pendidikan, maka rata-rata penduduknya sudah mengenyam pendidikan mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan institusi pendidikan yang bertambah dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah tinggi.

Jumlah Prasarana Pendidikan :

- | | |
|---------------------|----------|
| a. Perguruan Tinggi | : - Buah |
| b. SMA Negeri | : - Buah |
| c. SMA Swasta | : 1 Buah |
| d. SMP Swasta | : 2 Buah |
| e. SD Negeri | : 9 Buah |
| f. SD Swasta | : 1 Buah |
| g. TK | : 7 Buah |
| h. PAUD | : 5 Buah |
| i. Pondok Pesantren | : 3 Buah |



B. Profil Sekolah (Lokasi Penelitian)

Yapeni adalah sebuah Lembaga Pendidikan Swasta di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Nasional. Sekolah yang terakreditasi: A menyandang predikat “sangat baik” ini memiliki izin Dinas Pendidikan dengan Nomor : NPSN 20231168 NSS 2020203063. Lembaga yang berdiri pada tahun 1991, dengan luas tanah 1750 M². Sekolah yang bertempat di Jalan Mayor Oking Jaatmaja No 26, Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat. Pada awal berdirinya sekolah ini memiliki siswa pertama yang berjumlah 120 orang, saat ini Yapeni telah berhasil meluluskan lebih dari 10.000 siswa didiknya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Yapeni terus berupaya maju tanpa mengenal kata mundur, banyak sekali penghargaan yang telah kami raih dan itu menjadi motivasi untuk maju ke depan untuk mendidik anak-anak bangsa agar lebih maju dengan Iman, Ilmu, dan Amal. Tidak cukup dengan sejumlah penghargaan sekolah ini mengusung visi yang diantaranya ialah; unggul dalam prestasi dan berwawasan Nasional dan berakhlakul karimah. Guna mewujudkan visi tersebut Yapeni mengurainya dalam sebuah misi pendidikan yang diantaranya ialah; (1). Meningkatkan KBM (2). Meningkatkan dedikasi dan prestasi (3). Mencetak generasi Muslim peduli agama dan cinta Tanah air (4). Menciptakan suasana harmonis dengan nuansa Islami (5). Membina silaturahmi. Dengan memadukan semuanya sekolah ini yakin dapat berdiri dan bersaing di tengah-tengah pesaing yang lebih unggul.

Adapun motto yang diusung oleh Yapeni ialah sebagai berikut: (1). Pendidikan Islam adalah sebagai harta kekayaan yang tiada duanya (2). Pendidikan Islam adalah harta warisan yang agung dan mulia, yang diwariskan oleh orang tua untuk seluruh Indonesia (3). Pendidikan Islam

adalah kepribadian dan harga diri seorang hamba (4). Tanpa pendidikan Islam tiada cita-cita dan masa depan yang berarti

Program-program yang ditawarkan Yapeni dibagi menjadi dua bagian pertama; Program Studi Tambahan dan kedua; Program Eskul (ektrakurikuler). Untuk program studi tambahan yang diusung sekolah antara lain ialah:

- a. Tadarus Al-Qur'an setiap hari pukul 07.15 s/d 07.30 WIB
- b. Pelaksanaan Sholat Dhuha secara rutin
- c. Keterampilan Agama dalam meningkatkan membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an
- d. Kursus Bahasa Inggris
- e. Keterampilan dalam Seni dan Budaya
- f. Keterampilan dalam berpidato dengan perpaduan wawasan pengetahuan umum dan Agama
- g. Pelaksanaan Sholat Jum'at di Sekolah
- h. Pramuka Sebagai Kegiatan Wajib Siswa

Banyak ragam kegiatan yang ditawarkan sekolah dalam menarik minat stakeholder untuk masuk bersekolah, mungkin sebagian calon siswa yang berkeinginan masuk ke salah satu sekolah, mereka memandang dari segi kepopulerannya, keunggulannya dalam akademik dan non akademik, prestasinya, hingga pemilihan sekolah Negeri dan Swasta. Tapi sebagian kecil lainnya melihat dari program eskul yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut, sehingga tak heran sekarang ini banyak program-program eskul yang mengikuti perkembangan zaman seperti Modern Dance, Broadcasting, Cheerleaders, dsb. Tak ada yang salah dari itu semua, kehadirannya menjadi pilihan eskul di sekolah yang menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah pesaing di Industri pendidikan. Sejak era Mohammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau melahirkan permen yang mewajibkan kegiatan Pramuka

sebagai eskul wajib di semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Redup kegiatan Pramuka pada dunia pendidikan disinyalir menjadi penyebab permen tersebut dikeluarkan, sepiunya peminat dalam berkegiatan berpramuka menjadi factor utama selain factor pendanaan yang menghambat kegiatan tersebut, sehingga dalam kurikulum 2013 kegiatan kepramukaan diwajibkan. Mari kita lihat apa yang ditawarkan Yapeni melalui Program Eskulnya di sekolah, diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. PASKIBRA
- b. PRAMUKA
- c. Palang Merah Remaja (PMR)
- d. Futsal
- e. Basket
- f. Pencak Silat
- g. Anggar
- h. Paduan Suara
- i. Marawis
- j. ROHIS

Kesepuluh eskul di atas menjadi nilai tawar bagi para calon siswa yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya dalam mengikuti kegiatan eskul di sekolah ini. Semuanya memiliki nilai tambah dalam mengasah kemampuan peserta didik di sekolah, boleh jadi melalui kegiatan eskul tersebut karakter mereka terbentuk sehingga menjadi pribadi yang berkarakter kuat dalam hal positif.

Berdasarkan data yang didapatkan dari situs sekolah kita milik kemendikbud yang bersumber dari BANSM Yapeni memiliki nilai akreditasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------|
| a) Standar Isi | : 89 |
| b) Standar Proses | : 86 |
| c) Standar Kelulusan | : 95 |
| d) Standar Tenaga Pendidik | : 84 |

e) Standar Sarana Prasarana	: 80
f) Standar Pengelolaan	: 91
g) Standar Pembiayaan	: 89
h) Standar Penilaian	: 90
i) Nilai Akhir	: 88
j) Akreditasi	: A

Sumber dari BANSM di atas diperlukan, guna menilai seberapa baiknya praktek manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Yapeni, sehingga bahasan dari penelitian ini dapat merujuk kepada hasil dari penilaian BANSM yang di kutip dalam situs sekolah kita yang di kelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Gambar 4.2 Denah Yapeni



Tabel 4.1
Jumlah Rombel (Rombongan Belajar) beserta nama wali- wali kelas

No.	Kelas	Wali Kelas	Jumlah
1	^s VII A	Ust. Abdurrahman	32 siswa
2	^t VII B	Novita Gresli W, S.Pd	30 siswa
3	^r VII C	Jualeha, S.E.	30 siswa
4	^u VIII A	Nurul Sri Hyuningtyas, S.Pd	42 siswa
5	^k VIII B	Sri Kaswati, S.E.	42 siswa
6	^t VIII C	Riandy, S.Pd	42 siswa
7	^u VIII D	Dede Rosmilla, S.Pd	43 siswa
8	^r IX A	Debby Geniawati, S.E	34 siswa
9	IX B	Roni Kurniawan, S.Pd.i	35 siswa
10	^o IX C	Tri Rochayati, S.Pd	33 siswa
11	^r IX D	Dianita Erry. P. S.Pd	35 siswa

Struktur Organisasi SMP YAPENI

Ketua Yayasan : Drs. H. Deden Ubaidillah
 Kepala Sekolah : Drs. Ali Arsyi
 Wakasek : Tantan BA. S.E.
 Bendahara : M. Ridwan
 Kepala TU : Cakong Setra
 Kesiswaan : Fikri Hafiz S.Pd.
 Pembina OSIS : Agi Majidi. S.E.
 BP : Roni Kurniawan. S.Pd.i

Daftar Pendidik dan Non Kependidikan

Tri Rokhayati S.Pd. : Guru Matematika (Wali Kelas IX C)
 Hasim Jupri : Guru PAI
 Sri Kaswati. S.E. : Guru PKN (Wali Kelas VIII B)

Riandy S. Pd.	: Guru PJOK (Wali Kelas VIII C)
Debbie Geniawati. S.E.	: Guru IPS (Wali Kelas IX A)
Tantan BA.S.E.	: Guru TIK
Dianita Ery Prasiska. S. Pd.:	Guru IPA (Wali Kelas IX D)
Novita Gresli. S. Pd.	: Guru B. Inggris (Wali Kelas VII B)
Abdul Aziz. S. Pd.	: Guru SBK (Wali Kelas VII C)
Abdul Rahman	: Guru Muhadhoroh (Wali Kelas VII A)
Nurul Sri H. S. Pd.	: Guru B. Indonesia (Wali Kelas VIII A)
Dedeh Rosmila S.Pd.	: Guru Matematika (Wali Kelas VIII D)
Arlan Batubara	: Guru B. Inggris
Dadang Iskandar	: Satuan Pengamanan (Satpam)
Arif Surahman	: Pembantu Sekolah

C. Deskripsi Informan Penelitian

Beberapa informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya dalam penelitian ini, sebagian lainnya menolak untuk disebutkan namanya dalam penelitian ini, dan peneliti sangat menghargai privasi seorang informan dalam penelitian ini, adapun informan yang bersedia disebutkan namanya dikategorikan dalam informan kunci, sedangkan yang tidak bersedia dikategorikan dalam informan pendukung. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci

a. Ali Arsyi

Beliau merupakan pimpinan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapeni, bapak Ali ialah kepala sekolah yang menarik, humoris, dan tegas. Dengan akses sundanya yang sangat kental sekali, beliau memberikan gambaran umum tentang kondisi pembiayaan pendidikan di SMP ini, tidak banyak yang bisa disampaikan oleh bapak Ali,

dikarenakan beliau sedang mengalami sakit dan membutuhkan istirahat.

b. Roni Kurniawan

Bapak Roni Kurniawan merupakan informan pertama dalam penelitian ini, beliau seorang ayah dari tiga orang anak, yang berprofesi sebagai Guru Madrasah Tsanawiyah, Wali kelas, Guru BP, Wiraswasta, dan Praktisi Pengobatan Herbal. Dalam pertemuan pertama lewat diskusi kecil sederhana beliau memaparkan kondisi manajemen pembiayaan sekolah yang terjadi di kelurahan Puspanegara. Dengan pembawaan yang ramah, tegas, dan lugas beliau tidak menjelaskan dan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang penelliti lontarkan lewat wawancara sederhana dan diskusi kecil. Beliau tidak segan-segan membantu peneliti dalam mencari informan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, serta membantu peneliti menyambung komunikasi jarak jauh, sehingga data dalam penelitian dapat diperoleh lalu kemudian disajikan.

c. Ridwan

Informan kunci kedua ialah bapak M. Ridwan, lahir di Jakarta 21 Desember 1968. Saat ini usianya 48 tahun, beliau merupakan bendahara sekolah untuk tingkatan SMP, yang posisinya belum tergantikan sejak lama, beliau merupakan informan yang dicari dan ditunggu kehadirannya dalam menjelaskan dan menjabarkan seluruh permasalahan pembiayaan di sekolah yang meliputi budgeting, acounting, dan auditing. Pembawaannya yang tegas, lugas, teliti, mahir dan kompeten di bidangnya dalam menjelaskan seputar managerial pembiayaan di sekolah ini. Wawancara berlangsung di kantor bendahara dengan dampingan dari Bapak Ali Kepala Sekolah untuk tingkatan SMP. Wawancaranya

menarik dan beliau cukup kooperatif dalam menjelaskan seputar pembiayaan di sekolah beserta masalah-masalah yang dihadapinya.

2. Informan Pendukung

a. Suyadi

Informan kedua dalam penelitian ini ialah Bapak Suyadi. Beliau merupakan salah seorang orang tua murid yang saya temui saat proses penelitian ini berlangsung, tujuan memilihnya sebagai informan dalam penelitian ini ialah agar data yang disajikan tidak datang dari satu arah, serta data yang disajikan lebih bervariasi, karena menghadirkan dan melibatkan beberapa element yang terlibat dalam proses pendidikan yang kemudian melahirkan pandangan dan pendapat lain. Sosoknya yang ramah dan tegas ini terlihat dari kesediaannya ketika menerima ajakan peneliti dalam sebuah pembincangan hangat.

b. Ibu Haryati Sopiah

Informan pendukung selanjutnya ialah seorang lansia berusia 73 tahun, beliau merupakan aktifis dunia pendidikan, pemilik catering, dan PKK. beliau sudah sekian lama mengamati dunia pendidikan sejak lama, terutama perkembangan pendidikan di sekitaran daerah wilayah kelurahan Puspanegara, Citeureup, dan Karang Asem Barat. Pengalamannya berkecimpung pada dunia pendidikan sejak tahun 1975 menarik perhatian peneliti untuk menjadikannya sebagai informan pendukung dalam penelitian ini. Sosoknya yang tetap sehat dan bugar meski sudah di makan usia, semangatnya belum pudar dalam mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada dunia

pendidikan, sehingga tak jarang ibu-ibu PKK, guru-guru sekolah sekitaran kelurahan menganggapnya sebagai sesepuh di dunia pendidikan. Karena sosoknya itulah mereka memanggilnya dengan sebutan “Oma”.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti pada kurun waktu bulan februari 2016 sampai april 2016. Seperti yang dibahas di atas, seluruh informan yang bersedia melakukan wawancara adalah elemen-elemen yang terlibat dalam sebuah manajemen pembiayaan pendidikan.

Mengacu pada Moleong (1994), untuk pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian.⁴⁹

Agar kondisi diatas dapat terpenuhi, peneliti membuat sebuah kisi-kisi instrument penelitian yang terdiri dari observasi, pengamatan terus-menerus, dokumentasi, wawancara, triangulasi dan membicarakan hasil temuan dengan orang lain, menganalisis data negative, dan menggunakan referensi.

1. Budgeting (Penyusunan Anggaran)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan, terkait dengan bagaimanakah sekolah menjalankan manajemen pembiayaan sekolah dalam hal budgeting atau penyusunan anggaran. Sedikit mengulang, dalam

⁴⁹Muhammad Idrus, *Op Cit.*, hal 248

landasan teori di atas dijelaskan bahwa budgeting atau penyusunan anggaran merupakan rencana yang menyangkut keperluan dan kebutuhan orang banyak. Seluruh komponen pendidikan berkaitan dengan pembiayaan, meskipun pembiayaan bukan menjadi factor penentu sekolah itu dikatakan berkualitas. Agar uang yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka dalam penyusunan anggaran diatur oleh ketentuan atau azas yang menjaga proses pemasukan dan pengeluaran menjadi stabil. Tidak luput dari perhatian juga, budgeting atau penyusunan anggaran dipengaruhi oleh dua factor; internal dan eksternal, sehingga dimungkinkan setiap tahunnya anggaran tersebut berubah-ubah.

Beralih ke sesi wawancara dengan Bapak Ridwan Beliau memberikan gambaran tentang budgeting atau penyusunan anggaran yang terjadi di sekolah. Menurutnya, penyusunan anggaran di sekolah ini terbentuk melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun setiap bulan juni dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKAS-P) untuk membuat perubahan berdasarkan Juknis BOS. Adapun sumber dananya berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan sukarela orang tua siswa secara berkala dan incidental. Sumbangan yang sifatnya berkala dilakukan setiap bulan dengan besaran Rp. 35.000,00., (tiga puluh lima ribu rupiah) per-siswa sumbangan incidental dilakukan setiap dua minggu sekali yang besarnya tidak ditentukan. Adapun besaran dana BOS per-triwulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 per-siswa atau $1.000.000,00 \times 382$ siswa. Adapun siswa kurang mampu, yatim dan piatu berjumlah 45 siswa, mereka semuanya dibebaskan dari semua pembiayaan dengan ketentuan

menunjukkan surat keterangan kurang mampu dari Desa se-tempat.

Dalam penyusunan anggaran dan alokasi dana, pihak sekolah, bendahara, dan komite guru memperhatikan pakem-pakem yang telah ditetapkan oleh Juknis BOS agar penggunaan dana dapat diawasi dan terkontrol sehingga penggunaannya efektif dan efisien. Tak lupa semua penyusunan anggaran harus memenuhi 8 SNP atau bahkan lebih. Seperti penjelasan Bapak Ridwan berikut ini :

“...dalam penyusunan anggaran, kami mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan komite guru dalam merancang kegiatan dan anggaran sekolah untuk satu tahun ajaran. Berhubung dana yang diperoleh dari BOS maka kami sesuaikan dengan Juknis BOS dan Permen (peraturan menteri), misal pada Juknis BOS 2015 dijelaskan adanya pelarangan untuk pembelian satu set komputer, maka kami menaati pedoman ini. Tapi bukan berarti tidak boleh membeli sepenuhnya, biasanya hanya dalam penulisan tertera demikian, namun pada kenyataannya kami masih dapat membelinya secara terpisah seperti membeli mouse, monitor, dsb. Jadi hanya dalam bahasa penulisan dan pelaporan saja.”⁵⁰

Jika disimak pernyataan dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan dalam penganggaran sekolah mengadakan rapat dengan kepala sekolah, bendahara, dan komite guru. Penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan Juknis BOS dan Peraturan Menteri yang berlaku.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan 21 April 2016

Sumbangan sukarela yang berasal dari orang tua siswa besarnya ditentukan dalam rapat komite sekolah, hasilnya akan diumumkan melalui prosedur pemberian surat kepada orang tua siswa. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat operasional dan kembali ke siswa. Dalam penyusunannya terjadi perkembangan dan penurunan, ini berbanding lurus dengan jumlah siswa yang masuk. Hal tersebut wajar terjadi karena merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan perubahan suatu anggaran setiap tahunnya. Pernyataannya berbunyi:

“...begini ya mas, sekolah ini kan tergolong dalam sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan, jadi, sumber dana kami berasal dari BOS dan sumbangan sukarela orang tua. Kalo untuk BOSnya per-kepala satu juta rupiah dikali 382 siswa. Sumbangan orang tua atau SPPnya tiga puluh lima ribu rupiah. kemudian kami merancang dalam RKAS, RKAS-P yang dibuat setiap juni dan desember sesuai dengan Juknis dari BOS. anggarannya kadang naik kadang turun, ya tergantung jumlah sama siswa yang masuk aja”⁵¹

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa naik dan turunnya jumlah besaran sumber dana yang masuk dan diperoleh sekolah ditentukan dengan jumlah siswa yang masuk kemudian disusun dalam RKAS dibulan juni dan RKAS-P dibulan desember sesuai dengan Juknis BOS yang setiap tahunnya berubah-ubah.

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan 21 april 2016

Penyataan diatas dilengkapi oleh bapak Roni Kurniawan yang menjelaskan bahwa dalam penggunaan anggaran pengeluaran belanja kami tidak bisa menggeser anggaran lainnya, karena anggaran tersebut sudah dirapatkan dan ditetapkan bersama, pernyataan diatas sesuai dengan Azas pengeluaran belanja berdasarkan mata anggaran, dimaksudkan agar menjaga sirkulasi pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien.

“...contohnya begini mas, dulu kami bikin anggaran untuk perakitan satu set perangkat computer, kami menganggarkan 7 juta rupiah untuk budgetnya, ternyata setelah kami survey di toko, untuk spek computer yang kami inginkan anggarannya melebihi dengan yang telah kami tetapkan, jadi kami memurunkan speknya agar sesuai dengan anggaran”⁵²

Jika disimak pernyataan dari pernyataan diatas, bapak Roni dkk, telah menggunakan anggaran pengeluaran belanja dengan efektif dan efisien, karena sesuai dengan azas pengeluaran belanja sesuai dengan mata anggaran.

Pernyataan berbeda datang dari Ibu Haryatini Sopiha, dalam pernyataan yang lebih luas terkait dengan sumber dana yang berasal dari sumbangan sukarela orang tua siswa. Beliau menyatakan bahwa :

“...iya memang, sekolah biasanya memberikan surat permohonan dana atau sumbangan sukarela orang tua siswa, itu oma akui karena memang itu jalan yang harus diambil komite sekolah untuk membantu kegiatan sekolah, tapi, kadang itu dimanfaatkan sebagian orang tua siswa untuk mengkatrol anaknya untuk

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Roni Kurniawan 21 april 2016

*sekedar naik kelas atau lulus dari sekolah, kalau kata oma sih itu cuma oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan materil, jadi menurut oma kegiatan tersebut mencederai pendidikan di Indonesia.*⁵³

Maksud dari ungkapan tersebut ialah terkait sumber dana yang berasal dari sumbangan sukarela orang tua siswa yang terkadang dimanfaatkan oleh segelintir oknum tertentu, kegiatan tersebut sudah mencederai wajah pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, setelah melalui proses dan tahapan dalam penyajian data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran berdasarkan bukti temuan di lapangan, sekolah ini telah menerapkan beberapa azas dan ketentuan dalam penggunaan anggaran sekolah. Meskipun dalam beberapa kasus ditemukan kekurangan, namun secara keseluruhan manajemen pembiayaan di sekolah yang kaitannya dengan budgeting atau penyusunan anggaran berjalan dengan baik.

Informan selanjutnya ialah Bapak Suyadi, beliau melihat perihal pembangunan ruang kelas, perbaikan dan perawatan gedung sekolah. Sebagai orang tua siswa beliau berpendapat bahwa seharusnya sekolah ini dapat memaksimalkan perawatan dan perbaikan ruang kelas dan gedung sekolah melalui dana yang turun dari BOS maupun Sumbangan sukarela orang tua siswa. Berikut pemaparannya

“,,, coba mas liat plafon yang ada di atas, lapuk karena rembesan air hujan, kemudian

⁵³Hasil wawancara dengan Ibu Haryatini Sopiah 28 februari 2016

genteng sekolah kalo dilihat banyak yang bocor dan belum diganti, ini sebabnya plafon sekolah ini bergambar, hahahahaha (tertawa), maka tadi saya bilang sama masnya, seharusnya bisa maksimal dalam pengelolaan dan penggunaan sumber dana, atau mungkin pihak sekolah menunggu kerusakan yang lebih parah, supaya sekalian benerinnya.... canda mas... ”⁵⁴

Maksud dari ungkapan tersebut ialah terkait sumber dana yang seharusnya dapat dimaksimalkan dan digunakan secara efektif dan efisien untuk perbaikan dan perawatan gedung sekolah.

Sangat menyenangkan wawancara dengan Bapak Suyadi ini, kritis namun penuh dengan canda tawa dalam penjelasannya. Peneliti membenarkan kondisi tersebut, memang sudah seharusnya plafon yang lapuk dan genteng yang bocor diganti, karena dapat saja mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah saat hujan turun.

Perawatan dan pemeliharaan gedung merupakan bagian dari anggaran sekolah yang setiap tahunnya masuk dalam daftar anggaran yang sifatnya *Capital Cost* atau anggaran yang keberadaannya tidak terus menerus.

Berdasarkan dialog dari berbagai narasumber di atas, dapat ditarik konklusi bahwa masalah budgeting yang dijalankan oleh lembaga pendidikan tersebut sudah memperhatikan pedoman yang berlaku dalam penyusunan anggaran. 3 (tiga) azas dalam penyusunan anggaran pun tak luput dari perhatian,

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Suyadi 10 februari 2016

termasuk karakteristik dalam pembiayaan pendidikan.

2. Accounting (pembukuan)

Accounting atau dalam bahasa Indonesia akuntansi merupakan suatu seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan, transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam dunia pendidikan pun accounting termasuk dalam kegiatan pembiayaan pendidikan, yang kurang lebih penerapannya sama dengan di perusahaan.

Dalam accounting terdapat dua proses yang mewakili terjadinya seni catat-mencatat transaksi yakni: pendapatan dan pengeluaran. Sepertinya sebutannya “pendapatan”, mencatat semua sumber-sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, sumbangan atau iuran, yayasan, dan orangtua siswa. Pengeluaran dalam prosesnya memiliki ketentuan-ketentuan yang melibatkan pertimbangan setiap anggaran belanja, atau bagian dari Unit Cost baik mikro maupun makro. Manajemen keuangan yang baik ialah memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber pendapatan, dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Lebih lanjutnya informan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kegiatan pembukuan tersebut berlangsung di sekolah, pak Ridwan menyatakan bahwa :

“...untuk kegiatan pembukuan disekolah ini, dapat dikategorikan dalam dua pencatatan, pertama pendapatan sumber dana dan kedua pengeluaran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sumber-sumber dana kita berasal dari BOS dan Sumbangan sukarela orang tua siswa, ya biasanya kami mencatat berupa SPP

*yang masuk, berapa Sumbangan yang masuk, dan berapa dana BOS yang masuk. Kalau udah tau besarnya baru kita anggarkan dan kita catat berapa dana yang didapat, yang dikeluarkan serta dapat disimpan, tidak ada sumber dana lain selain dari pemerintah dan sumbangan sukarela orang tua siswa, kalau pengeluaran semisal gaji guru, pembantu sekolah, biaya perawatan gedung, biaya pengajaran, biaya operasional sekolah dll, semua masalah pengeluaran kami catat dengan baik, dan ada bukti-bukti transaksinya,*⁵⁵

Setelah disimpulkan maksud dari pernyataan diatas ialah secara keseluruhan kegiatan catat-mencatat demi kebutuhan pembukuan sekolah berjalan dengan baik, sehingga pendapatan, penyimpanan, dan pengeluaran biaya pendidikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Kegiatan catat-mencatat dalam keperluan pembukuan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepaiawaian seorang bendaharawan dalam memajukan usul-usul tentang sumber pendapatan, dan perkiraan pengeluaran anggaran pendidikan. Sehingga kecakapan seorang bendaharawan menentukan baik tidaknya pembukuan sekolah tersebut.

Dalam pembukuan seorang bendaharawan dilatih dan diberikan pengetahuan tentang format-format pelaporan pertanggungjawaban, mereka dibekali dan difasilitasi oleh Manajemen BOS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau UPT di-Kecamatan. Sehingga para bendaharawan dari berbagai

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan 21 April 2016

latarbelakang pendidikan memiliki kemampuan yang sama dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ridwan dalam wawancara di bawah ini :

“...iya kami dibekali pelatihan oleh pihak manajemen BOS sama UPT dinas pendidikan kecamatan citeureup, biasanya setiap terbit Juknis BOS baru, kami diberikan pengetahuan tentang format-format pelaporan yang berlaku dan sesuai dengan Juknis BOS⁵⁶

Setelah disimpulkan pernyataan di atas mengungkapkan bahwa para bendaharawan sekolah diberikan pelatihan tentang penyusunan dan pembukuan laporan pertanggung jawaban oleh Manajemen BOS dan UPT dinas pendidikan kecamatan citeureup.

Dalam proses pengumpulan data kaitannya dengan accounting atau pembukuan ini, peneliti tidak dapat menggali lebih jauh lagi, hal tersebut disebabkan karena data yang ingin dicari jawabannya merupakan hak seorang bendaharawan dan privasi Sekolah, jadi tidak merupakan keharusan seorang bendaharawan menjelaskan masalah pembukuan ini secara detail.

Mengacu kepada teori yang dianut pada proses pembiayaan pendidikan. Tahapan kedua di atas sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya, ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan bendaharawan sekolah yang cukup kooperatif dalam menjelaskan transparansi keuangan baik yang masuk

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan 21 april 2016

maupun keluar dicatat dengan sebaik mungkin. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencatatan, pelaporan atau pengukuran terhadap biaya pendidikan di lembaga ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Auditing (pemeriksaan)

Kegiatan pemeriksaan pembukuan keuangan secara berkala merupakan suatu pertanggungjawaban seorang bendaharawan atau orang yang terkait langsung dalam pembukuan terhadap pihak yang berwenang.

Auditing memiliki proses yang berkala mulai dari pembuatan laporan sampai kepada pemeriksaan oleh pengaudit atau badan pemeriksa keuangan.

Informan yang sama yakni pak Ridwan menjelaskan bagaimanakah proses auditing yang terjadi disekolah ini, menurutnya ialah:

“...proses auditing disekolah ini dilakukan oleh auditor dari pihak yayasan dan dari pihak manajemen BOS, auditing berlangsung di korwil atau komisariat yang bertempat di SMP Negeri 1 Citeureup, biasanya kami mendapatkan pesan melalui whatsapp setiap triwulannya.”⁵⁷

Maksud dari paparan diatas ialah dalam proses auditing atau pemeriksaan di lakukan oleh pihak yayasan dan manajemen BOS sebagai auditornya, kegiatan auditing berlangsung disatu tempat yang biasa mereka sebut korwil atau komisariat di SMP Negeri 1 Citeureup.

Ada beberapa instrumen yang dibawa dalam monitoring BOS seperti : (1). Buku Kas (2). RKAS

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan 21 April 2016

(3). RKAS-P (4). Kas Tunai (5). Kas Umum (6). Rekening Bank (7).RKAS BOS Pusat (8). Buku Pajak (9). Buku Fisik Pembelian (10). Laporan BOS K-7 (11).Surat Pernyataan Kepala Sekolah (12). Surat Pemberitahuan Alokasi Dana BOS Pusat (13). Laporan BOS Online kemdikbud.go.id.

Adapun untuk form Informasi Publik terdiri dari :

- a. BOS 03 (Rencana Penggunaan Dana BOS)
- b. BOS 04 (Laporan Penggunaan Dana BOS)
- c. BOS 05 (Spanduk Sekolah Bebas Pungutan)
- d. BOS K-7a (Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS)

Pada kesempatan kali ini Bapak Ridwan menunjukkan Instrumen-instrumen tersebut kepada peneliti secara terbuka, terlihat lembaran-lembaran kertas tersebut merupakan hasil auditing triwulan sebelumnya yang sudah disahkan oleh manajemen BOS, Bendahara Sekolah, dan Kepala Sekolah.

Karena proses auditing melibatkan beberapa pihak seperti atasan, maka bahasan ini merujuk kepada Bapak Ali Arsyi sebagai kepala sekolah dalam mengevaluasi bagian keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan maupun yang belum. Berikutnya penjelasannya :

“...proses auditing merupakan proses evaluasi bagi saya, karena dengan adanya auditing, saya dapat mengetahui bagian dari keseluruhan anggaran yang sudah terlaksana

maupun yang belum, sekaligus mengurangi penghambatnya demi penyusunan anggaran yang akan datang, karena ini bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan sumber dana dan juga memperhitungkan biaya tahun ini sebagai acuan perencanaan yang akan datang”⁵⁸

Maksud dari pemaparan diatas ialah fungsi atasan dalam pengawasan auditing dan evaluasi bagian dari keseluruhan anggaran yang sudah terlaksana serta menganalisis factor penghambatnya sebagai acuan penyusunan anggaran di tahun yang akan datang.

Penjelasan berikutnya datang dari Bapak Ridwan dalam lanjutan wawancara mengatakan bahwa :

“...kalo masalah auditing, manajemen BOS sebagai auditornya dari dinas pendidikan hanya mendampingi saja, kalo BPK dan BPK pusat biasanya mengaudit jika kucuran dana yang sekolah dapat di atas 200 juta, kalo cuma puluhan juta mah manajemen BOS”⁵⁹

Maksudnya adalah auditor berasal dari Manajemen BOS yang didampingi dinas pendidikan, adapun BPK dan BPK Pusat mengadakan audit jika besaran sumber dana yang diperoleh sekolah diatas nominal 200 juta rupiah.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses auditing di sekolah ini berlangsung secara berkala baik oleh kepala sekolah, yayasan, manajemen

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Arsyi 21 April 2016

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan 21 April 2016

BOS maupun sidak dari BPK dan BPK pusat. Sidak yang dilakukan oleh BPK Pusat biasanya terjadi apabila sekolah tersebut menerima kucuran dana dengan jumlah sangat besar, jadi jarang sekali BPK dan BPK pusat mengadakan audit ke sekolah.

Tahapan terakhir dalam pembiayaar pendidikan ialah auditing, proses final dari semua tahapan proses pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan setiap pekanan, bulanan, tahunan. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kepala sekolah setiap minggunya, dan oleh BPK setiap bulan dan tahunan. Kegiatan ini merupakan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jenis-jenis auditing setidaknya ada tiga antara lain (1). Audit laporan keuangan (2). Audit kepatuhan (3). Audit operasional. Adapun kegiatan auditing yang dimaksudkan di atas telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait dan sekurang-kurangnya dapat memberikan dampak dan manfaat bagi lembaga pendidikan khususnya dan bagi pihak terkait umumnya.

INDONESIA

BAB V

PENUTUP

Setelah menelaah pembahasan sebelumnya, pada bab terakhir ini, setidaknya ada dua hal pokok bahasan terpadu yang peneliti kemukakan, terhadap semua hasil penelitian yang diperoleh, dua hal tersebut terdiri atas kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan pendidikan di sekolah ini masih menitikberatkan dari sumber utama yakni pemerintah dan orang tua siswa. Belum ada upaya lainnya dari pelaku lembaga pendidikan Islam dalam mencari sumber lain selain sumber utama yang dimaksudkan. Hal ini sangat penting, sebagai sumber penunjang di luar sumber utama, agar suksesi lembaga pendidikan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Hal positif lainnya ditunjukkan dalam pembukuan sekolah, terhadap kompetensi seorang bendaharawan dalam menjalankan tugasnya dibidang keuangan sekolah, semakin baik seorang bendaharawan dalam mengelola sumber dana yang diperoleh sekolah serta penggunaannya, maka semakin sehat pula kondisi keuangan sekolah yang berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan di sekolah ini.
3. Dalam auditing anggaran terjadi secara berkala yakni pekanan, bulanan dan tahunan, proses tersebut melibatkan kepala sekolah, yayasan sekolah, manajemen BOS, dinas pendidikan tingkat kecamatan, serta BPK dan BPK Pusat dari kabupaten dan Provinsi. Auditing dilakukan secara formatif

maupun sumatif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja sekolah yang dicatat dan disusun dengan acuan yang telah disepakati bersama dalam Juknis BOS

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap manajemen pembiayaan yang terjadi di sekolah ini. Sebagai tindak lanjut bersama, penulis menyampaikan beberapa saran untuk menjadi masukan dan menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kelurahan Puspanegara khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Untuk mempermudahnya dalam penyampaian peneliti membaginya dalam tiga kategori yakni: sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan.

1. Sekolah

Setelah mampu bertahan selama 25 tahun ini seharusnya sekolah ini dapat berkembang pesat dalam melahirkan generasi-generasi kuat seperti yang al-Quran kutip dalam salah satu suratnya yang isinya ialah *"dan takutlah kalian jika meninggalkan generasi lemah di bawah kalian"*. Generasi penerus harus kuat di bidang akademik, organisasi, dan teknologi. Tentunya berlandaskan motto yang sekolah ini bangun *"Maju dalam Iman, Ilmu, dan Amal"*. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan ialah : (1). Dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran, sekolah harus melengkapi fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga nilai-nilai materi ajar dapat disampaikan dengan baik. (2). Untuk mengoptimalkan sumber dana yang ada, perlu adanya hubungan emosional yang erat antara bendaharawan, kepala sekolah, dan ketua yayasan. Ketiga unsur tersebut penentu sebuah organisasi

pendidikan dalam menggunakan dan mengelola dana pendidikan agar digunakan secara bijaksana, efektif, dan efisien. (3). Dalam mengupayakan sumber dana, sekolah jangan terpaku pada dana BOS dan sumbangan orangtua siswa, perlu mengusung kemandirian financial mulai dari sekarang, banyak potensi bisnis yang dapat dibangun pada sekolah ini, mengingat lokasinya yang strategis untuk membangun bisnis guna menciptakan kemandirian financial sehingga keuangan sekolah menjadi kuat. (4). Membangun dan merawat infrastruktur sekolah, agar guru dan siswa nyaman saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. (5). Menunggak pemberian gaji guru dan staff merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, sekalipun dana itu belum ada, sekolah seharusnya memberikan penjelasan dan transparansi keuangan yang ada di sekolah, sehingga tidak menimbulkan konflik di internal. (6). Perlu adanya bentuk kesyukuran yang tak terhingga setelah mampu berdiri dan bertahan selama ini, lewat peningkatan mutu akademik, mutu lulusan, dsb.

2. Orang tua

Keterlibatan orang tua siswa dalam mensukseskan kegiatan pendidikan di sekolah selama ini telah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan evaluasi-evaluasi yang hadir dari orang tua siswa terhadap pelayanan yang didapati di sekolah. Namun setidaknya peneliti memberikan satu atau dua buah saran atau bahkan lebih untuk para orang tua siswa yang diantaranya ialah : (1). Lebih kritis dalam menanggapi isu-isu pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun sekolah, sehingga tanggungjawab pendidikan dipikul bersama oleh para orang tua dan sekolah. (2). Turut serta dalam mensukseskan

pendidikan dengan membekali para anaknya di rumah tentang pergaulan bebas, bahaya tawuran antar pelajar, geng motor, dsb . karena pendidikan itu luas bukan hanya sekedar di dalam kelas melainkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan itu adalah sebuah pendidikan. (3). Upaya orang tua dalam memberikan sumbangan sukarela guna kegiatan operasional sekolah perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi di rumah.

3. Dinas Pendidikan

Saran bagi dinas pendidikan adalah : (1). Agar proses pembelajaran lebih baik dari sekarang, perlu didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang profesional, mengingat tantangan dari krisis multidimensi yang terjadi belakangan ini, maka kualitas tenaga pendidik sangat penuh perhatian. (2). Pemerintah melalui dinas pendidikan tingkat kecamatan maupun tingkatan lebih lebih, diharapkan mampu melakukan auditing anggaran secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian dan bukan hanya sekedar formalitas belaka, karena dana yang dipakai adalah milik Negara dan masyarakat, maka perlu lebih kritis dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang ke-autentikan suatu barang atau kebutuhan yang dibeli saat proses auditing berlangsung. (3). *Follow up* (menindak lanjuti) kegiatan auditing anggaran dilaksanakan, hal ini diperlukan karena selama ini kegiatan tersebut luput dari pantauan pemerintah melalui dinas pendidikan dan sekolah, dengan adanya *follow up* auditing anggaran akan lebih sehat, jujur, jauh dari mark up anggaran, atau bahkan korupsi-korupsi kelas kecil, dengan adanya *follow up* juga diharapkan mampu

mengungkapkan kejahatan masiv dalam penggunaan pendidikan. Contoh: sekolah mencantumkan pembelian semen dan pasir yang disertai nota pembelian, alasannya digunakan untuk perbaikan dan perawatan gedung sekolah, faktanya sekolah menggunakan sisa-sisa bahan kontruksi bangunan yang ada di sekolah, hal tersebut luput dari pantauan dinas pendidikan atau bahkan BPK sekaligus. (4). Sidak yang dilakukan BPK pusat seharusnya dilakukan sesering mungkin untuk mengantisipasi kegiatan maladministrasi dana pendidikan di sekolah. (5). Ikut serta mempromosikan sekolah di masyarakat dalam setiap kegiatan kelembagaan, karena banyak siswa-siswi sekolah yang berbakat namun minim perhatian pemerintah. (6). Mampu mensinergikan unsur-unsur yang dapat mensukseskan kegiatan pendidikan seperti : sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, donator, dsb. (7). Membuat kualifikasi penghuni posisi bendahara di sekolah, karena kapabilitas dan kredibilitas bendahara penentu sehatnya sirkulasi keuangan sekolah dalam mengelola sumber dana yang didapat.

Berdasarkan keterbatasan peneliti saat ini, disarankan kepada peneliti lanjutan untuk mengkaji factor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen pembiayaan di sekolah dengan jumlah responden yang lebih banyak dan hasil yang lebih baik, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif serta dengan variasi teknik pengumpulan data yang lebih lengkap dan analisis statistik. Peneliti menyadari hasil penelitian ini sifatnya tidak mutlak absolute, sehingga dikemudian hari muncul-muncul penelitian baru yang menambal atau bahkan membantah hasil penelitian ini. Peneliti menyadari akan hal tersebut, mengingat

ilmu yang sifatnya relevan, maka perlu adanya kemajuan penelitian dan riset ilmiah dibidang pendidikan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi., Yuliana. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- Armida. 2012. “*Sistem Anggaran Pendidikan*” (Studi Tentang Penganggaran Pendidikan dan Efektifitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi). *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, (2 Oktober 2012), Vol. 13, No. 2, hal. 1, Kolom. 1
- Baihaqi dan Nasir Usman. 2012. “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar*”, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Unsyiah Kuala Banda Aceh*, (1 Agustus 2012), Vol. 1, No. 1, hal, 29-30, kolom 2.
- Budaya, Budi. 2011. “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu*”, Disertasi Doktor, Malang; Universitas Negeri Malang.
- Dewanto, Adi., Utari, Rahmania. 2006. “Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* vol 3, No. 1, hal 25-26 (1 April 2006), , kolom 1-2.
- Fatahillah, Arrozi. 2011. “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan bagi Anak kurang mampu di Pondok Pesantren Al-Ishlah Dadapan Bondowoso*”.Tesis, Malang, Universitas Negeri Malang.
- Fattah, N. 2008. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Fattah, N. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : RosdaKarya

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi ke-2*. Erlangga : Jakarta
- Indriati, Iin. 2011. *“Hubungan Manajemen Keuangan BOS dan Kegiatan Operasional Sekolah dengan Kinerja di Sekolah Dasar seKecamatan Kesambi Kota Cirebon”*. Tesis, Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati IAIN Cirebon.
- Isulaningtyas, Aryani, Luluk. 2015. *“Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)”*. Tesis, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Koswara, Soeharni., Nuryantini, Yeni, Ade. 2002. *“Manajemen Lembaga Pendidikan”*. Bandung : Patragading.
- Nasta'in, Ahmad. 2012. *“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiah Tanjungsari Tersoro Batang”*. Thesis Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
- Noor Syam, Mohammad. 1986. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Usaha Nasional : Surabaya
- Nurbakin, Taufik. 2012. *“Pengelolaan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang”*. Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Munir, Ahmad. 2013. *“Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam”*, *Ejournal Unida Gontor*, Malang, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim
- Prasojo, Diat, Lantip. 2010. *“Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan”*, *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, vol 4, No. 2010, hal 19
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 Bab V Hal, 27 Point 1

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Buku, No 2 Tahun 2008 Bab VII Pasal 11.

Sugiyono., 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabet.

Sukmadinata, Syaodih, Nana.,2006. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Sukino. 2011. "*Usaha Orangtua Siswa dalam Pembiayaan Pendidikan(Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinon Klaten)*".Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Supriadi, D. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sutisna, Oteng. 1985. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung : Angkasa.

Tanthowi, Jawahir. 1983. "*Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*," Jakarta: Pustaka al-Husna, Hal. 71.

Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang : IKIP Malang



Curriculum vitae

Personal Detail



Nama : Muhammad Seftian Akbar
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 23 September 1990
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hobi : Futsal, Music, Traveling
Status : Belum Menikah
Telepon : 085719958889 / 082223827770
Email : seftianakbar@icloud.com
seftianakbar90@gmail.com

Education

2014-2017 : Magister Pendidikan PPs FIAI-UII
2010-2014 : Strata 1 Pendidikan Agama Islam FIAI-UII
2003-2008 : Gontor For Boy 1 (Ponorogo)
1997-2002 : SD Islam Karya Mukti (Bogor)
1996 : TK Islam Karya Mukti (Bogor)

Experiences

- 2017 : Pembicara di Fisipol UGM dalam rangka peringatan Hari Buruh Se-dunia
- 2017 : Penguji Bakal Caleg KM UII periode 2017/2018
- 2017 : Wakil Ketua GC3
- 2014 – 2015 : Asisten HRD Manager PT. Young Won Indonesia (Subang)
- 2013 – 2014 : Kabid PSDK (Pengembangan Sumber Daya Kader)
HMI MPO Komisariat FIAI UII
- 2013 – 2014 : Komisi 1 KPU KM UII
- 2012 – 2013 : Kabid Eksternal HMI MPO Komisariat FIAI UII
- 2012 – 2013 : SEKJEND Dewan Perwakilan Mahasiswa FIAI UII
- 2011 – 2012 : OC dan SC Pekan Ta'aruf Mahasiswa (TAMAH)
- 2011 – 2012 : Kabid PSDM (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa)
Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII
- 2008 – 2009 : Jenjang Pengabdian Gontor di Al-Haramian (Lampung Tengah)

Achievements / Workshop / Training

- 2015 : Training dari MNC Life Jogja sebagai FC (Financial Consultant)
- 2014 : Predikat Cumlaude dari Universitas Islam Indonesia
- 2013 : Workshop Penelitian Tindakan Kelas
- 2013 : Seminar Dinar Dirham

2012 : Lokakarya Kemitraan Polri dan Masyarakat (POLDA
D.I.Y)

2012 : Training Kelembagaan UII

2009 : Kursus Bahasa Inggris di Pare-Kediri

Additional Skills

Programmes :

Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, Movie maker, Android system

Driving licence category (A / C)

Language :

Arabic Speaking and Writing medium level

Active and Native Speaker arabic and english



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA